



repository:

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN TANAMAN
TERPADU MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran, Kecamatan
Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

MAHMUD SUYUTI DAHLAN

NIM. 0710310123



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

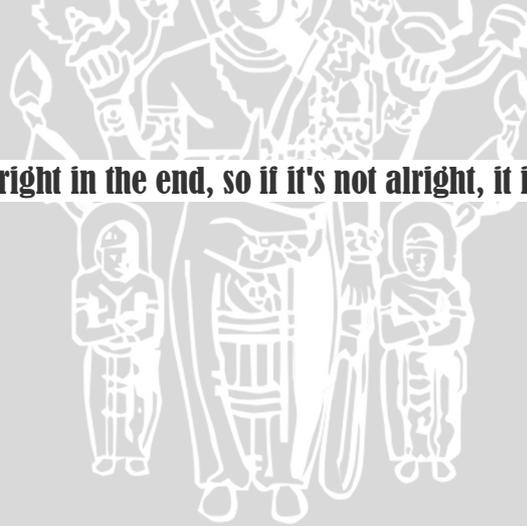




MOTTO

“DAN JANGANLAH KAMU BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI SETELAH (DICIPTAKAN) DENGAN BAIK. BERDO’ALAH KEPADA-NYA DENGAN RASA TAKUT DAN PENUH HARAP. SESUNGGUHNYA RAHMAT ALLAH SANGAT DEKAT KEPADA ORANG YANG BERBUAT KEBAIKAN. DIALAH YANG MENIUPKAN ANGIN SEBAGAI PEMBAWA KABAR GEMBIRA, MENDAHULUI KEDATANGAN RAHMAT-NYA (HUJAN), SEHINGGA APABILA ANGIN ITU TELAH MEMBAWA AWAN MENDUNG, KAMI HALAU KE SUATU DAERAH YANG TANDUS, LALU KAMI TURUNKAN HUJAN DI DAERAH ITU. KEMUDIAN KAMI TUMBUHKAN DENGAN HUJAN ITU BERBAGAI MACAM BUAH-BUAHAN. SEPERTI ITULAH KAMI MEMBANGKITKAN ORANG YANG TELAH MATI, MUDAH-MUDAHAN KAMU MENGAMBIL PELAJARAN. DAN TANAH YANG BAIK, TANAMAN-TANAMANNYA SUBUR DENGAN IZIN TUHAN; DAN TANAH YANG BURUK, TANAMAN-TANAMANNYA YANG TUMBUH MERANA. DEMIKIANLAH KAMI MENJELASKAN BERULANG-ULANG TANDA-TANDA (KEBESARAN KAMI) BAGI ORANG-ORANG YANG BERSYUKUR.” (Q.S. AL-A’RAF (7) : 56-58)

"Everything will be alright in the end, so if it's not alright, it is not the end!"





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

Disusun oleh : Mahmud Suyuti Dahlan

NIM : 0710310123

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 23 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota

Drs. Mochammad Rozikin M.AP
NIP. 1963050319 8802 1 001





repository:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 15 Juli 2014
- Jam : 10.00 WIB
- Skripsi atas nama : Mahmud Suyuti Dahlan
- Judul : Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

Dan Dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Mochamad Makmur, MS
 NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota

Drs. Mochammad Rozikin M. AP
 NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota

Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
 NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota

Drs. Heru Wibawanto, MS
 NIP. 19520911 197903 1 002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

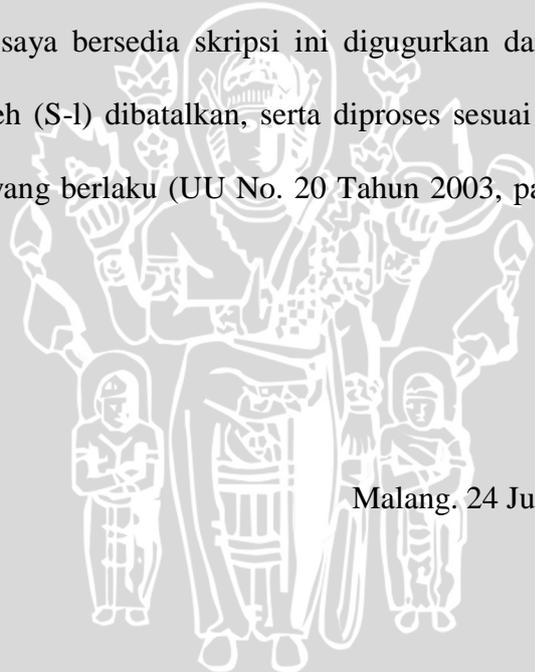




PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 24 Juni 2014

Nama : Mahmud Suyuti Dahlan
NIM : 0710310123





RINGKASAN

Mahmud Suyuti Dahlan, 2014, Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Ketua Pembimbing: Dr. Mochamad Makmur, MS, Anggota: Drs. Mochamad Rozikin M.AP. 105 +

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan di masing-masing desa dilakukan oleh Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Munjungan dan Mantri Tani Munjungan. Tujuan secara umum dari adanya Program Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah peningkatan produktivitas tetapi peneliti mengkaji dari aspek pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek (2) Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaan program SL-PTT sudah terlaksana dengan baik di Kelompok Tani Singgih Makmur. Dilihat dari aspek pembangunan berkelanjutan terhadap program pengelolaan tanaman terpadu masih banyak indikator pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan penyuluh dan kelompok tani.

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan serta Mantri Tani Munjungan hendaknya lebih memperhatikan penyerapan teknologi pertanian melalui pemahaman masalah dan peluang petani. Untuk Kelompok Tani Singgih Makmur diharapkan menambahkan anggota kelompok yang mata pencahariannya bergantung pada hasil bumi.





SUMMARY

Mahmud Suyuti Dahlan, 2014, Implementation of Integrated Crop Management Programs Towards Sustainable Development (The Study On Singgih Makmur Farmers Group Masaran Village Munjungan Subdistrict Trenggalek Regency). Chairman Supervisor: Dr. Mochamad Makmur, M.S, Member: Mochamad Rozikin M.AP. 105 +

This research was conducted with the aim to describe the implementation of Integrated Crop Management programs Towards sustainable development. This is done by the Department of agriculture forestry and Plantation districts of Trenggalek in implementation in each village was carried out by the porch extension officers (BPK) Munjungan and Mantri Munjungan. General purpose of the existence of an integrated Crop Management programs is increased productivity but researchers examining aspects of sustainable development.

Research methods used in this research is descriptive research with qualitative approach, with the focus of the research (1) implementation of Integrated Crop Management programs Towards sustainable development on Singgih Makmur Farmers Group Masaran Village Munjungan Subdistrict, Trenggalek Regency (2) restricting and supporter Factors in the implementation of integrated crop management towards sustainable development.

The results showed that in terms of the implementation of the program been implemented SL-PTT was going well at Singgih Makmur Farmers Group. Seen from the aspect of sustainable development of integrated crop management programs there are still many sustainable development indicators noteworthy by extension officers and farmers groups.

Proposed suggestions based on research results is Munjungan extension officers and Mantri Munjungan should pay more attention to the absorption of agricultural technology through understanding of problems and opportunities. For Singgih Makmur farmer groups is expected to add group members, whose livelihoods depend on the earth .





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Implementasi Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Qomarudin dan Ibu Boniyah, serta kedua kakakku Ichwan Mustofa dan Nurul Khasanah terima kasih selalu memberikan cinta, dukungan, arahan, motivasi, dan doanya sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing terima kasih selalu atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini .
3. Bapak Drs. Mochamad Rozikin M. AP selaku dosen pembimbing terima kasih selalu atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak Penyuluh Kecamatan Munjungan serta Mantri Tani Kecamatan Munjungan.





8. Teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Khususnya untuk teman angkatan 2007
9. Semua pihak yang telah membantu mewujudkan terselainya skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalas budi baik mereka.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk sekarang atau yang akan datang. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 24 Juni 2014

Penulis





DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN i

SUMMARY ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kontribusi Penelitian..... 6

E. Sistematika Pembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

A. Administrasi Pembangunan Dalam Administrasi Publik..... 9

1. Administrasi Publik..... 9

2. Administrasi Pembangunan 12

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan 15

4. Paradigma Pembangunan..... 16

B. Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable Development*)..... 16

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 16

2. Strategi dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan . 18

3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 19

C. Konsep Program..... 23

1. Program Pembangunan 23

2. Implementasi Program 24

D. Pengelolaan Tanaman Terpadu 28

1. Pengertian Pengelolaan Tanaman Terpadu 28

2. Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Tanaman Terpadu..... 29

3. Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu.... 30

4. Pengertian Sekolah Lapang PTT 31

5. Azas dan Tujuan SLPTT 32

E. Konsep Petani..... 33

1. Pengertian Petani..... 33

2. Pengertian Usaha Tani 35

3. Pendapatan Petani 36

4. Kelompok Tani..... 37





BAB III METODE PENELITIAN 40

- A. Jenis Penelitian 40
- B. Fokus Penelitian 40
- C. Lokasi dan Situs Penelitian 42
- D. Sumber Data 43
- E. Teknik Pengumpulan Data 45
- F. Analisis Data 47
- G. Teknik Keabsahan Data 49

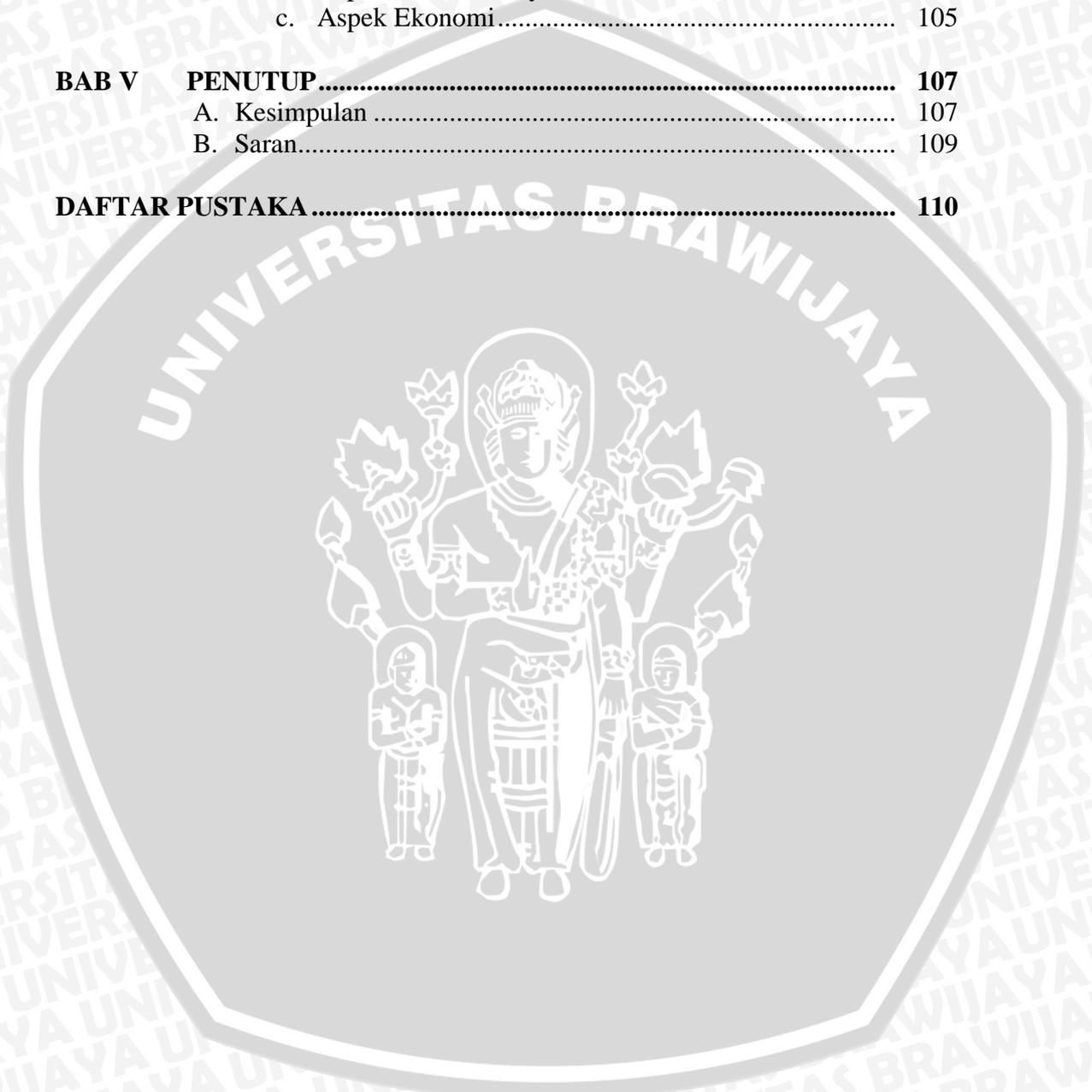
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 51

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
 - 1. Profil Kecamatan Munjungan 51
 - a. Kondisi Geografis 51
 - b. Kondisi Kependudukan 52
 - c. Kondisi Pertanian 54
 - 2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Trenggalek 57
 - a. Visi dan Misi 57
 - b. Tugas, Pokok, dan Fungsi 59
 - c. Struktur Organisasi 60
 - 3. Profil Badan Penyuluh Kecamatan (BPK) Munjungan ... 62
 - a. Letak 62
 - b. Tugas dan Fungsi 63
 - c. Struktur Organisasi 64
 - 4. Profil Kelompok Tani Singgih Makmur 65
- B. Penyajian Data 66
 - 1. Pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) 66
 - a. Pengoperasian Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten trenggalek 66
 - 1) Organisasi 66
 - 2) Interpretasi 71
 - 3) Penerapan 82
 - b. Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan 88
 - 1) Aspek Lingkungan 88
 - 2) Aspek Sosial-Budaya 91
 - 3) Aspek Ekonomi 93
 - 2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Melaksanakan Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan 94
- C. Analisis dan Interpretasi Data 96
 - 1. Pengoperasian Program Pengelolaan Tanaman Terpadu pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran 96





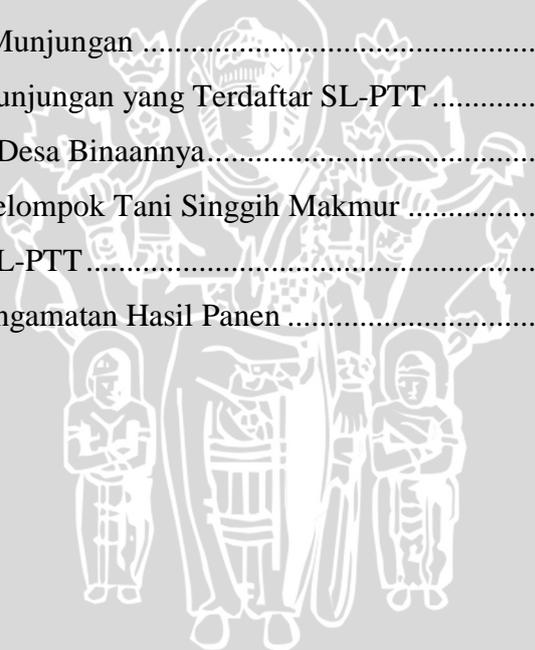
a. Organisasi.....	96
b. Interpretasi.....	99
c. Penerapan.....	101
2. Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan.....	102
a. Aspek Lingkungan.....	102
b. Aspek Sosial-Budaya.....	104
c. Aspek Ekonomi.....	105
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110





DAFTAR TABEL

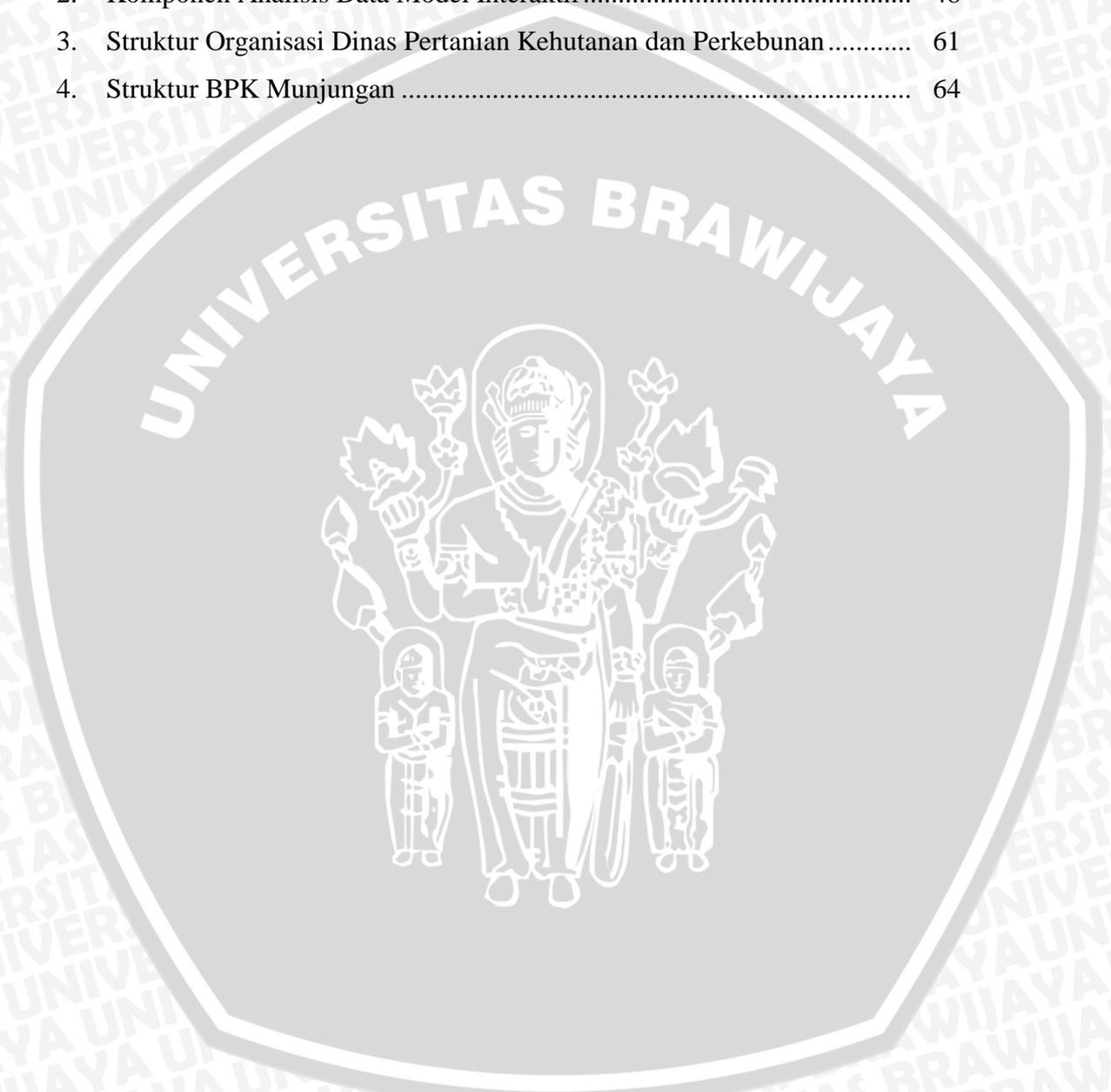
No. Judul	Hal.
1. Sasaran SL-PTT Tahun 2010.....	5
2. Luas Kecamatan di Trenggalek.....	51
3. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Munjungan.....	53
4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Masaran	53
5. Jenis Penggunaan Tanah	54
6. Pola Tanam Usaha Tani Munjungan.....	55
7. Luas Tanah Sawah Perdesa di Munjungan	56
8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	62
9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	62
10. Ketenagaan BPK Munjungan	65
11. Kelompok Tani Munjungan yang Terdaftar SL-PTT	70
12. Penyuluh tani dan Desa Binaannya.....	70
13. Peserta SL-PTT Kelompok Tani Singgih Makmur	83
14. Jadwal Kegiatan SL-PTT	86
15. Data Rata-Rata Pengamatan Hasil Panen.....	87





DAFTAR GAMBAR

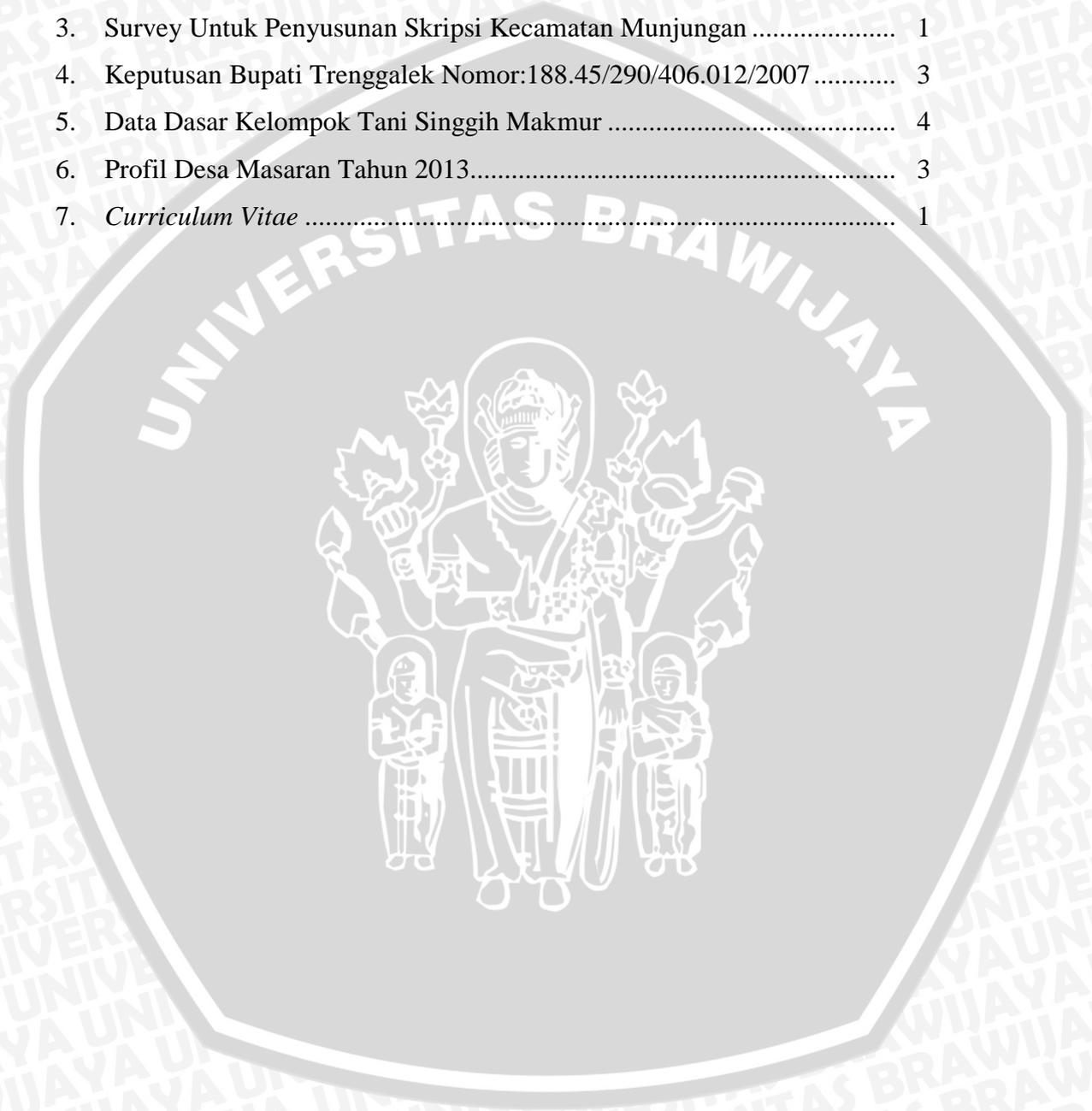
No. Judul	Hal.
1. Model Kesesuaian Implementasi Program	27
2. Komponen Analisis Data Model Interaktif	48
3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan	61
4. Struktur BPK Munjungan	64





DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Jumlah Hal
1. Dokumentasi Gambar Hasil Penelitian.....	2
2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey Kesbangpollinmas.....	1
3. Survey Untuk Penyusunan Skripsi Kecamatan Munjungan	1
4. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:188.45/290/406.012/2007	3
5. Data Dasar Kelompok Tani Singgih Makmur	4
6. Profil Desa Masaran Tahun 2013.....	3
7. <i>Curriculum Vitae</i>	1





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari 95% penduduk Indonesia. Usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga pertanian. Selain itu, beras juga merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika campur tangan pemerintah Indonesia sangat besar dalam upaya peningkatan produksi dan stabilitas harga beras. Kecukupan pangan (terutama beras) dengan harga yang terjangkau telah menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian. Kekurangan pangan bisa menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional (Muh. Martajuddin Nuur, 2011).

Jika sektor pertanian ini dikaji melalui sudut pandang administrasi pembangunan maka tidak mengherankan jika sektor ini terus melakukan perombakan menuju posisi ideal karena sektor ini adalah pilar utama di sektor penyediaan makanan terutama beras, Tjokrowinoto menyatakan bahwa pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik (Tjokrowinoto dalam Suryono, 2004). Menurut BPS (2009), jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 230 juta orang. Penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi mencapai 247,5 juta orang dan akan menjadi 273,2 juta orang pada tahun 2025. Menuju tahun 2025





mendatang, Indonesia dituntut untuk mampu mencukupi minimal 95% dari kebutuhan beras nasional (swasembada). Pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Kebutuhan beras diperkirakan masing-masing sebesar 55,8 juta ton, 58,9 juta ton, 62,3 juta ton, dan 65,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Karena adanya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan beras tersebut maka pemerintah harus terus meningkatkan produksinya serta perangkat kebijakannya sesuai yang ditargetkan.

Sebagai usaha peningkatan produksi dan produktivitas lahan sawah, pemerintah Indonesia pada tahun 1968 melakukan modernisasi pertanian melalui program intensifikasi pertanian berbasis teknologi revolusi hijau. Segala upaya dan dana disediakan untuk mendukung program ini, sarana dan prasarana dicukupi. Program-Program pendampingan demi tercapainya swasembada beras juga digulirkan diantara program Bimas dan Inmas, petani dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Program intensifikasi usaha tani khususnya padi sebagai makanan pokok diprioritaskan pada pemakaian benih varietas unggul, pupuk kimia, dan obat-obatan pemberantas hama penyakit. Kebijakan pemerintah pada saat itu secara jelas merekomendasikan penggunaan energi dari luar serta didukung dengan pemberian subsidi harga pupuk dan obat-obatan yang terjangkau oleh petani-petani kecil. Kebijakan ini merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara memacu penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara tidak bijaksana sehingga menimbulkan berbagai kerusakan baik pada aspek agroekosistem maupun kondisi sosial budaya masyarakat. Faktor-Faktor penyebab kerusakan sumber daya alam pertanian dan lingkungan merupakan efek samping dari pola budi daya yang mengarah pada sistem monokultur dan sentralisasi kebijakan untuk mengejar target produk dan ekspor,





serta penggunaan input (pupuk dan pestisida) yang berlebihan karena di dorong kebijakan harga atau subsidi (Salikin, 2003). Penerapan program intensifikasi pertanian berbasis teknologi revolusi hijau telah mengubah pola bertani, diantaranya pola pemupukan, pola tanam dan pemakaian pestisida. Revolusi hijau dimotori oleh penggunaan varietas unggul responsif terhadap pupuk anorganik tetapi sering memerlukan pestisida untuk proteksi dari serangan hama penyakit, sehingga boros sumberdaya dan tidak ramah lingkungan. Penanaman satu varietas murni dalam areal yang luas telah mendesak keragaman genetik berbagai varietas unggul lokal yang biasa ditanam petani, yang berarti telah mempersempit keragaman genetik tanaman (Sumarmo, 2006)

Karena kegagalan paradigma pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi pada pertanian era revolusi hijau tersebut maka perlu dikembangkan inovasi pertanian yang lebih holistik yang mencakup tidak hanya mengedepankan sektor ekonomi tetapi perlu perhatian lebih terhadap sektor ekologi (lingkungan) serta manusia sebagai penggerak pembangunan itu sendiri. Di sektor pertanian sekarang dikenal dengan adanya inovasi teknologi dengan pengembangan pola bertani yang didasarkan atas sistem pertanian berkelanjutan. Menurut Salikin (2003), sistem pertanian yang berkelanjutan pada prinsipnya adalah kembali ke alam (*back to nature*), yakni sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Sistem pertanian berkelanjutan juga berisi ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kesadaran lingkungan, bernilai ekonomis dan berwatak sosial.





Sistem pertanian berkelanjutan ini menggunakan beberapa pendekatan teknologi atau model sistem, diantaranya adalah: sistem pertanian organik, sistem pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luaran rendah, sistem pengendalian hama terpadu, teknologi pemupukan hayati, pengelolaan tanaman terpadu, dan *sistem of rice intensification* (SRI). Penerapan teknologi pertanian berkelanjutan pada lahan sawah telah memberikan hasil positif, terutama dalam peningkatan pendapatan petani, karena selain ada nilai tambah produk/beras, sistem pertanian ini juga mengurangi atau bahkan tidak menggunakan bahan-bahan kimia.

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Program Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi dimana sistem pertanian ini selaras dengan paradigma pertanian berkelanjutan. Tujuan dari PTT padi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani padi serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu. Sasaran yang dicapai dalam PTT secara umum dari segi produktivitas adalah meningkatkan produktivitas padi inbrida sawah 0,75 ton/ha, padi hibrida 2 ton/ha, padi pasang surut 0,3 ton/ha, padi rawa lebak 0,3 ton/ha dan padi lahan kering/gogo 0,5 ton/ha pada areal SL-PTT (Pednis SL-PTT padi dan jagung 2013).

Pencapaian sasaran produksi tahun 2010 lewat program PTT di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:



Tabel 1: Sasaran SL-PTT tahun 2010

No	Kegiatan	Luas tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (Ku/ha)	Produksi (Ton)
A.	Fokus Utama				
1.	SL-PTT Padi Hibrida	1.000	960	80,35	7.714
2.	SL-PTT Padi Non Hibrida	4.600	4.416	65,00	28.704
3	SL-PTT Padi Gogo	1.300	1.248	52,30	6.527
	Jumlah A	6900	6.624	64,83	42.945
B.	Diluar Fokus Utama				
1.	Bantuan Benih 2009	6000	5.760	65,90	37.958
2.	Swadaya	13.300	12.768	59,52	75.996
	Jumlah B	19.300	18.528	61,50	113.955
	Jumlah A+B	26.200	25.152	62,38	156.899

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Trenggalek

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (2010), dari empat kecamatan di Kabupaten Trenggalek (Watulimo, Pogalan, Trenggalek, Gandusari) yang dilaksanakan pendampingan diperoleh 6,90 t/ha untuk Laboratorium Lapangan, 6,54 t/ha untuk Sekolah Lapangan, dan 6,21 t/ha untuk Non-Sekolah Lapangan. Dilihat dari perolehan data tersebut maka SL-PTT di Kabupaten Trenggalek belum berhasil baik yang ada di Laboratorium Lapangan (LL) ataupun Sekolah Lapangan (SL) karena tidak mengalami kenaikan produksi sebesar 0,75 ton/ha padi inbrida.

Inti dari SL-PTT adalah mencari teknologi pertanian yang sesuai dengan lokasi SL-PTT itu sendiri, belum tentu jika rangkaian teknologi pertanian yang diterapkan di suatu tempat tertentu berhasil mendapatkan produktivitas tinggi terus di terapkan lain juga mendapat nilai produktivitas yang sama walaupun teknologi yang diterapkan sama. Maka dari itu peneliti mengkaji tema tentang **“Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju**

Pembangunan Berkelanjutan (*Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran?
2. Bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran.
2. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari peneliti ini terbagi menjadi dua, yakni kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Kontribusi Akademis
 - a) Sebagai bahan dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
 - b) Sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa perkuliahan.



c) Sebagai referensi bagi mahasiswa/ peneliti yang lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Kontribusi Praktis

a) Berguna bagi masyarakat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu dan referensi bagi masyarakat yang ingin mengikuti program pengelolaan tanaman terpadu

b) Berguna bagi pemerintah sebagai masukan konsep dan pengimplementasian program pengelolaan tanaman terpadu.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun uraian secara keseluruhan terhadap pembahasan skripsi ini agar mudah diketahui dan dipahami oleh pembaca, maka penulis membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga dengan demikian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini telah memuat beberapa sub-bab yang diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, adapun teori-teori tersebut adalah: administrasi publik, administrasi pembangunan, teori tentang pembangunan berkelanjutan, teori tentang program, pengertian SL-PTT, serta konsep berkaitan tentang petani.





III. METODE PENELITIAN

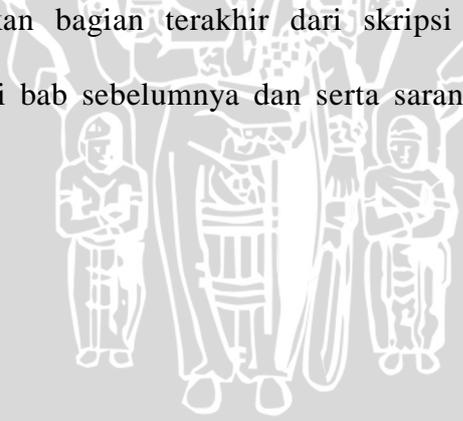
Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, fokus, pemilihan lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian yang kemudian di akhiri dengan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Merupakan penjelasan tentang gambaran umum obyek penelitian kemudian dilanjutkan dengan penyajian data meliputi; pelaksanaan program Pengelolaan Tanaman Terpadu kemudian dikaitkan dengan indikator pembangunan berkelanjutan diakhiri dengan analisis dan pembahasan mengenai fokus masalah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab sebelumnya dan serta saran-saran yang diajukan oleh peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan Dalam Administrasi Publik

1. Administrasi Publik

Menurut Donovan dan Jackson (1991:10) mengartikan kata administrasi sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Mereka menambahkan tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff, dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Sedangkan tentang pengertian administrasi publik Menurut Bintoro (1978:

1-2) Ada empat perumusan yang kurang lebih memadai untuk menjelaskan pengertian administrasi publik. Empat perumusan tersebut adalah:

- a) Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin;
- b) Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah;



- c) Kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya;
- d) Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Menurut Bintoro (1978) yang membedakan antara administrasi publik dengan ilmu politik adalah fungsi administrasi publik itu sendiri. Tiga fungsi dasar administrasi publik sebagai berikut:

- a) Formulasi (perumusan kebijakan)

Mengenai fungsi ini terdapat empat subfungsi formulasi yaitu: 1) kebijakan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada; 2). perumusan kebijakan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan nanti/ masa depan, dengan cara melakukan perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui; 3). supaya suatu program strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasar 1 dan 2 dapat disusun; dan 4). rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (*decision making*) dengan kata lain bagian perencanaan.

- b) Pengaturan (pengendalian unsur-unsur administrasi)

Unsur-unsur administrasi ini adalah: 1) struktur organisasi 2) keuangan 3) kepegawaian dan 4) sarana-sarana lain. Tugas administrasi ialah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut diatas.

- c) Penggunaan dinamika administrasi

kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan tidak saja bagi realisasi tujuan kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk mengendalikan unsur-unsur administrasi. Unsur dinamika administrasi ini meliputi: 1) pimpinan 2) koordinasi 3) pengawasan dan 4) komunikasi.

Dalam perkembangannya para ahli ilmu administrasi negara memberikan perhatian terhadap dua hal yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami masa perubahan. Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan lain (studi komparatif).

Perkembangan studi komparatif ilmu administrasi ini dapat pula dari segi alasan yang mendasarinya. Pertama adalah kebutuhan pengembangan model dan konsep atau teori administrasi, dan alasan lainnya adalah keperluan pengembangan administrasi bagi pembangunan. Sudah barang tentu dua alasan

yang mendasari ini tidak saling bertentangan.

Dalam perkembangan studi komparatif administrasi publik ini terdapat empat kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi publik. Klasifikasi dalam empat kecenderungan ini tidak konklusif, karena memang tidak ada sistimisasi yang diterima. Kecuali itu tidak ada batasan runag lingkup yang jelas antara masing-masing kecenderungan gagasan tersebut:

Pertama, adalah perhatian administrasi publik terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Penanggapan administrasi disini ditujukan kepada pelaksanaan program-program substantif pembangunan termasuk proses perumusan kebijakan dan instrumen untuk pelaksanaannya. Dalam kecenderungan ini juga diperhatikan interrelasi dengan ekologi politik. Kecenderungan pertama ini banyak didukung pula oleh “pengetahuan kebijakan” (*policy sciences*) oleh lasswell dan pemikiran-pemikiran tentang pembinaan institusi (*institution building*).

Kedua, menggunakan pendekatan behavioral (*behavioral approach*). Dalam kecenderungan ini ditelaah sikap dan peranan birokrasi serta berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut. Di sini dikembangkan kajian tentang bagaimana keputusan diambil, bagaimana pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan *performance* dan lain-lain. Suatu kecenderungan dimana “*administration becomes concerned with governing complex human system*”.

Ketiga, pendekatan manajemen dan administrasi publik. Pengembangan sistem analisis dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi publik. Penggunaan

teknik-teknik kuantitatif dan analitis seperti *operations research*, *program and performance budgeting* dan lain-lain.

Kecenderungan keempat, adalah studi komparatif ilmu administrasi publik yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Kecenderungan-kecenderungan ini lebih menekankan perhatian antar hubungan daripada sikap administratif dan lembaga-lembaga administratif dengan ekologi sosial budaya tertentu.

2. Administrasi Pembangunan

a. Definisi Pembangunan

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya mengandung arti:

1. Bangun dalam arti sadar/siuman (aspek fisiologi)
2. Bangun dalam arti bangkit/berdiri sendiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi)
4. Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik dianalogikan dengan konsep pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembauran, pembangunan, pengembangan dan pembinaan (Suryono, 2001:26)

Sedangkan menurut Bryant and White definisi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri (*sustainability*)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) dan saling menghormati (*interdependensi*) (Suryono, 2001: 37)

Hakekat dari pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Selain itu pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana yang dilakukan secara terus menerus di berbagai aspek untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

b. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan menurut Djamin ada 3 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
2. Maningkatkan taraf hidup, antar lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani)
3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perseorangan dan bangsa dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan (Djamin, 1984: 9)

Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil



sehingga masyarakat bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan keadaan serba kekurangan.

c. Unsur-unsur Pembangunan

Didalam pelaksanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pembangunan yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Proses, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus.
2. Sadar, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.
3. Berencana, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Modernitas, bahwa pembangunan mengarah pada modernitas. Sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
5. Multi-dimensional, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
6. *Nation Building*, bahwa kesemua hal tersebut diatas ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1990: 3-4).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana yang mengarah pada modernitas dan bersifat multi-dimensional yang bertujuan untuk membina bangsa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Ciri-ciri Pembangunan

Tjokrowinoto menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap

pertumbuhan dan periode waktu) yang dasarnya tidak jelas, dengan ciri-ciri pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar dan terencana.
3. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bebas nilai.
4. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat (Tjokrowinoto, 1990).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembangunan menyangkut suatu proses perubahan dilakukan secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah masa depan yang lebih baik.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian administrasi oleh negara untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Bintoro (1988:15) yaitu:

- a) Penyempurnaan administrasi negara, meliputi:
 1. Kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan
 2. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain, dan perlembagaan arti sempit.
- b) Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meliputi:
 - 1) Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Sering tercermin dalam rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik).
 - 2) Tata pelaksanaannya secara efektif.

4. Paradigma Pembangunan

Paradigma diartikan sebagai pola atau model atau cara pandang terhadap persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu, dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang lainnya tidak dapat disamakan maupun dipersatukan, tetapi hanya dapat diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan, sehingga tidak dapat diuji. Menurut Agus Suryono (2001:59) terdapat tiga paradigma yang dipandang cukup dominan, yaitu:

a) Paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*)

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang penekanannya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

b) Paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*)

Orientasi ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam waktu sesingkat mungkin. Pelaksanaan pembangunan bersifat sentralistik sehingga timbul ketergantungan rakyat.

c) Paradigma pembangunan manusia

Fokus dari paradigma ini yaitu berpusat pada manusia yakni perkembangan manusia, kesejahteraan, keadilan, dan berkelanjutan.

B. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

WCED (1987) menegaskan bahwa pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang didalamnya eksploitasi

sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan kesemuanya dalam keadaan selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Definisi ini sangat erat kaitannya dengan *intra-generational equity* (memenuhi kebutuhan generasi kini secara merata) dan *inter-generational equity* (memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi mendatang secara adil).

George (2000) memandang kedua hal tersebut merupakan prinsip dari pembangunan berkelanjutan, *intra-generational equity* merupakan kondisi yang penting untuk keberlanjutan, sedangkan *inter-generational equity* merupakan kondisi yang penting untuk pembangunan. Dalam *inter-generational equity*, prinsip equitas dalam keberlanjutan ditekankan pada konservasi modal/capital dalam bentuk alam, sosial maupun ekonomi sehingga tetap bernilai dan bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Sedangkan *intra generational equity*, prinsip equitas dalam keberlanjutan ditekankan kepada kesetaraan lokal, kesetaraan nasional maupun kesetaraan secara global. Adapun yang dimaksud kesetaraan di sini adalah kesetaraan dalam terpenuhinya kebutuhan sebagai akibat adanya pengaruh distribusi, perubahan biodiversitas dan perubahan sosial.

Tujuan pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga aspek yaitu keberlanjutan pertumbuhan yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan yang adil dan merata (*sosial progress*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Selanjutnya aspek tersebut bertambah dengan adanya aspek kelembagaan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*).

2. Strategi Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Elemen pembangunan berkelanjutan, yaitu: Pendapatan perkapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia. Dari elemen tersebut diperoleh komponen dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya: 2004):

- 1) Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial pembangunan harus dilandasi dengan hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, namun pemerataan adalah konsep yang sangat relatif dan tidak secara langsung dapat diukur.
- 2) Pembangunan yang menghargai keanekaragaman pemeliharaan seperti keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa dating. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan dalam tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.
- 3) Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif pada pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat dan merusak.

Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

- 4) Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini persepsi jangka pendek masih mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Indikator kinerja pembangunan berkelanjutan di daerah menurut pedoman teknis *Peringkat Kinerja Pembangunan Berkelanjutan Daerah* yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tahun 2001 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga prinsip yaitu *Environmentally sustainable/ Ecological Balance, Sosialy responsible/ Sosial progress* dan *economically viable/ economic growth* dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan yang berkelanjutan dan seimbang (*environmentally sustainable/ ecological balance*)

Environmentally sustainable merupakan prioritas pertama prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Kelestarian lingkungan adalah suatu

necesssary condition tetapi bukan *Sufficient condition* karena belum memasukkan dimensi sosial dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan secara ekologi saja, belum mencakup sebab-sebab terjadinya *unsustainable development*. Untuk memahaminya perlu perspektif yang luas yaitu *internalisasi humanism* ke dalam ekosistem.

Pembangunan harus lestari secara ekologis, tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan juga harus *socially* dan *economically sustainable*.

Dua criteria *environmentally sustainable* yang dikembangkan yaitu:

1) Terjaminnya ketersediaan sumber daya alam.

- a. Sumberdaya alam terbaru; laju eksploitasinya harus sesuai dengan kapasitas regenerasinya.
- b. Sumberdaya alam tak terbaru; laju pengurangannya tidak boleh melebihi laju *sustained income* atau substitusi terbaru yang dikembangkan melalui intervensi manusia.

2) Rendahnya tingkat pencemaran

Emisi pencemar tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan untuk menyerap.

2. Aspek sosial yang bertanggungjawab dan berkembang (*socially Responsible/ sosial progress*)

Aspek sosial merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, dan secara kolektif mencakup manusia, baik perorangan maupun kelompok, kepranataan serta interaksi yang terjadi antar komponen tersebut. Berbagai permasalahan sosial kemudian timbul menuntut berbagai kuantifikasi dan kualifikasi yang

spesifik dan rumit. Masalah-masalah sosial (*sosial problems*) acap kali disebut susah diukur secara konkrit/kuantitatif.

Masalah-masalah sosial tidak pada ukuran-ukuran yang menyanggah derajat akurasi/presisi yang tinggi. Berbeda dengan komponen-komponen lingkungan hidup hayati dan geofisik yang untuk pengukurannya memiliki baku mutu yang jelas, baku mutu sosial tidak mudah dimantapkan karena sulit menangkap tingkat ambang batasnya, di samping sangat rentan terhadap fluktuasi waktu dan dinamika masyarakat (perubahan sosial).

Oleh karena itu, yang diukur adalah gejalanya, yang kemudian secara teknis diartikan sebagai indikator. Berbagai indikator sosial yang diuraikan berikut ini yang terkait dengan penentuan peringkat kinerja pembangunan berkelanjutan daerah ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sifat data, sumber atau ketersediaan data, dan metodologi pengumpulan data.

Cirri-ciri *socially responsible*::

- a. Adanya keikutsertaan dari berbagai pihak yang masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab tertentu dan jelas. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif, setara dan bertanggung jawab,
- b. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman, serta adanya kesempatan berusaha, dan

c. Adanya pengakuan (hukum) terhadap hak-hak masyarakat serta kearifan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok masyarakat, misalnya melalui paten, serta perlindungan terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal (misalnya melalui peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal).

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*economically viable/economic growth*)

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Salah satu prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah "*Economically Viable*", yang terdiri dari kriteria, yaitu: pendapatan, tenaga kerja, investasi, dan pajak serta retribusi.

Dari keempat faktor tersebut sebaiknya masing-masing mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pendapatan dengan pertumbuhan yang tinggi, kontribusi yang lebih menitikberatkan pada sektor-sektor *non-resources based*, dan distribusi secara merata;
- 2) Kondisi tenaga kerja yang secara jumlah dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja dengan pertumbuhan yang optimal dan produktivitas tinggi;
- 3) Investasi yang diharapkan adalah investasi yang selalui tumbuh berkembang secara positif dan seimbang pada sektor-sektor *non*



resources based dan *resources based*. Disamping itu juga efisiensi yang ditujukan dengan sejauh mana investasi tersebut bias bermanfaat bagi pemanfaatan ekonomi, pemerataan, dan kesetaraan antara sektor *resources based* dengan *nono resources based*, dan

- 4) Pajak dan retribusi sebagai sumber dana pemasukan pemerintah daerah yang berasal dari kutipan sebagai sektor aktivitas ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan dan dialokasikan kembali sebagai input sebagai pembentukan produk atau proses produksi (kegiatan ekonomi).

C. Konsep Program

1. Program Pembangunan

Dari berbagai pengertian tentang program pembangunan, dapat diketahui bahwa program disamping bersifat alokatif dan distributif, program juga bersifat inovatif dan multifungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh *united nation* yang dikutip oleh Zauhar (1993:1-2) bahwa:

“programme is taken to mean a form of organized sosial activity with specific objective, limited in space an time, it often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.”

Dengan suatu program pembangunan berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Karena demikian banyaknya *problem* yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Atas dasar itulah maka di kebanyakan masyarakat berkembang muncul beragam program semisal program pembangunan desa, KB, peningkatan gizi, wajib belajar, penanggulangan perencanaan lingkungan dan lain lain. Program tersebut disamping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah

tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar masyarakat bangkit motivasinya dan inovasinya, karena mereka tertarik pada program yang dicanangkan. Dalam pencapaian tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber daya merupakan hal yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumberdaya dapat dilaksanakan secara tepat. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tujuan yang dirumuskan harus jelas.
- b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif.
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan berdiri sendiri.
- f) Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Zauhar, 1993:2)

2. Implementasi Program

Dari pengertian program jelas bahwa program terdiri dari jenis-jenis proyek yang terkait satu sama lain. Mengingat sifatnya yang demikian maka dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan aspek koordinasi dan konsistensi menjadi sangat penting. Keberhasilan program dan proyek dengan demikian sangat bergantung pada kerjasama organisasi/kelompok terkait. Walaupun koordinasi merupakan hal yang vital dalam implementasi program dan proyek, namun tidak semua program dibentuk koordinator program. Untuk menyebut program yang mempunyai koordinator program antara lain BKKBN di Indonesia, *the Philippine Rice Development Program*, *The National Diary*

Development Program of India, Kenya's Smallholder Tea Development Program, Mexico's Rural Education Program and The Publik Health Program of Chian (Zauhar, 1993:10).

Untuk dapat menilai program tersebut berhasil atau tidak Charless O. Jones (1991:35) menyebutkan ada beberapa penilaian yang harus dilakukan untuk menilai apakah implementasi program berhasil atau tidak dan standar penilaian yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:

1. Organisasi

Maksudnya di sini adalah bahwa organisasi/instansi pelaksana adalah organisasi/instansi yang harus memiliki struktur organisasi, memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas yang berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pegawai dalam hal ini adalah petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap unsur dituntut memiliki kemampuan yang memadai dengan bidang tugasnya.

2. Interpretasi

Maksudnya di sini adalah agar implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Sesuai dengan peraturan, berarti setiap pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana, berarti pelaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.
- c. Sesuai dengan petunjuk teknis, berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

3. Penerapan

Maksud penerapan disini yaitu peraturan kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan dimana untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin. Hal ini dapat dilihat dari :

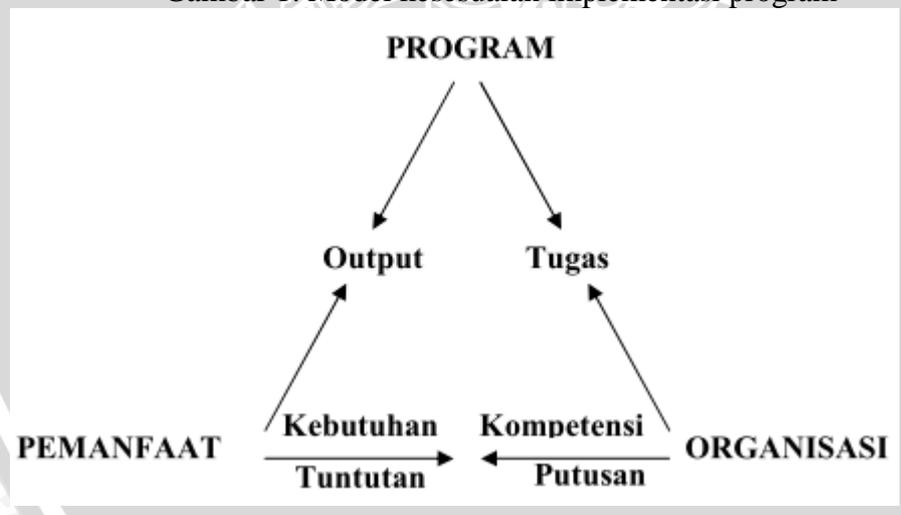
- a. Program kerja yang sudah ada memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara inti kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- b. Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik,

sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

- c. Jadwal kegiatan disiplin berarti program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhirinya agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program yang sudah ditentukan sebelumnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian korten digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Model kesesuaian implementasi program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara



apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000:12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat

D. Pengelolaan Tanaman Terpadu

1. Pengertian Pengelolaan Tanaman Terpadu

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan



iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. PTT padi dirancang berdasarkan pengalaman implementasi berbagai sistem intensifikasi padi yang pernah dikembangkan di Indonesia, hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar lahan sawah telah mengalami kemunduran kesuburan (lahan sakit), dan adopsi filosofi system intensifikasi padi (*system of rice intensification*) yang semula dikembangkan di madagaskar.

2. Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Tanaman Terpadu

Prinsip PTT mencakup empat unsur, yaitu:

a) Integritas

Dalam implementasinya di lapangan, PTT mengintegrasikan sumber daya lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim untuk mampu meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

b) Interaksi

PTT berlandaskan pada hubungan sinergis atau interaksi antara dua atau lebih komponen teknologi produksi.

c) Dinamis

PTT bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan teknologi dan penerapannya disesuaikan dengan keinginan dan pilihan petani. Oleh karena itu, PTT selalu bercirikan spesifik lokasi. Teknologi yang dikembangkan melalui pendekatan PTT senantiasa mempertimbangkan lingkungan fisik, biofisik, iklim, dan kondisi sosial ekonomi petani setempat.



d) Partisipatif

PTT juga bersifat partisipatif, yang membuka ruang bagi petani untuk memilih, mempraktekkan, dan bahkan memberikan saran kepada penyuluh dan peneliti untuk menyempurnakan PTT, serta menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada petani yang lain

Tujuan penerapan PTT padi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani padi serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu. Sasaran yang dicapai dalam PTT dari segi produktivitas adalah meningkatkan produktivitas padi inbrida sawah 0,75 ton/ha, padi hibrida 2 ton/ha, padi pasang surut 0,3 ton/ha, padi rawa lebak 0,3 ton/ha dan padi lahan kering/gogo 0,5 ton/ha pada areal SL-PTT.

3. Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi

Komponen teknologi dasar (*compulsory*) adalah komponen teknologi yang relatif dapat berlaku umum di wilayah luas, antara lain:

- a) Varietas modern: varietas unggul baru (VUB), Varietas Unggul Hibrida (VUh), dan Varietas Unggul Tipe Baru (VUTB)
- b) Bibit bermutu da sehat (perlakuan benih).
- c) Pemupukan efisien menggunakan bagan warna daun (BWD), Perangkat uji tanah sawah (PUTS), petak omisi, dan permentan No. 40/OT.140/4/2007 tentang pemupukan spesifik lokasi atau *software system* pakar pemupukan padi (SIPAPUKDI), dan
- d) PHT sesuai OPT sasaran



Komponen teknologi pilihan yaitu komponen teknologi spesifik lokasi, antara lain:

- a) Pengelolaan tanaman yang meliputi populasi dan cara tanam (legowo, larikan, dll)
- b) Bibit muda umur 14 hari setelah sebar (HSS) atau 21 HSS
- c) Bahan organik, pupuk kandang, dan ameliorant
- d) Irigasi berselang (perbaikan aerasi tanah)
- e) Pupuk cair (PPC, pupuk organik, pupuk bio-hayati, ZPT, pupuk mikro)
- f) Penanganan panen dan pasca panen.

4. Pengertian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

Sekolah Lapangan PTT (SL-PTT) adalah bentuk sekolah yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan. Hamparan sawah milik petani peserta program penerapan PTT disebut hamparan SL-PTT, sedangkan hamparan sawah tempat praktek sekolah lapang disebut laboratorium lapang (LL). Sekolah lapang seolah-olah menjadikan petani peserta sebagai murid dan pemandu lapang (PL I atau PL II) sebagai guru. Namun pada sekolah lapang tidak dibedakan antara guru dan murid, karena aspek kekeluargaan lebih diutamakan, sehingga antara “guru dan murid” saling member pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman.

SL-PTT juga mempunyai kurikulum, evaluasi pra dan pasca-kegiatan, dan sertifikat. Bahkan sebelum SL-PTT dimulai perlu dilakukan registrasi terhadap peserta yang mencakup nama dan luas lahan sawah garapan, pembukaan, dan studi banding atau kunjungan lapang (*field trip*).

Penciri SL-PTT adalah sebagai berikut:

- a) Peserta dan pemandu saling memberi dan menghargai
- b) Perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan kelompok tani (poktani) atau gabungan kelompok tani (gapoktani).
- c) Komponen teknologi yang akan diharapkan berdasarkan hasil praktek yang dilakukan oleh petani peserta
- d) Pemandu tidak mengajari petani, tetapi petani belajar dengan inisiatif sendiri, pemandu sebagai fasilitator memberikan bimbingan.
- e) Materi latihan, praktek, dan sarana belajar ada di lapangan.
- f) Kurikulum dirancang untuk satu musim tanam, sehingga dalam periode tersebut diharapkan terdapat 10-18 kali pertemuan antara peserta dengan pemandu.

5. Azas dan Tujuan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

Beberapa azas SL-PTT yang perlu dipahami oleh petani peserta maupun petani adalah:

- a) Sawah sebagai sarana belajar
- b) Belajar lewat pengalaman dan peneuan sendiri
- c) Pengkajian agro ekosistem sawah
- d) Metode belajar praktis
- e) Keterampilan berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan petani

Agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan keinginan, SL-PTT hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan untuk orang dewasa berdasarkan pengalaman sendiri. Untuk itu, materi pendidikan yang akan diberikan dalam SL-

PTT mencakup aspek yang diperlukan oleh kelompok tani di wilayah pengembangan PTT. Dalam kaitan itu, tiga aspek berikut perlu mendapat perhatian:

- a) Aspek teknologi: keterampilan dan Pengetahuan
- b) Aspek hubungan antarpetani: interaksi dan komunikasi
- c) Aspek pengelolaan: manager di lahan usaha tani sendiri.

Tujuan utama SL-PTT adalah percepatan penyebaran teknologi PTT dari peneliti ke petani peserta dan kemudian berlangsung difusi secara alamiah dari alumni SL-PTT kepada petani di sekitarnya.

E. Konsep Petani

1. Pengertian Petani

Menurut Anwas (1992:34) mengemukakan bahwa pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Tapi secara umum belum ada klasifikasi pertanian yang baku sampai saat ini. Pertanian sering digolong-golongkan menurut keperluan tertentu, sering tumpang tindih, sering berbeda di lain daerah. Tidak dapat dipungkiri antara petani dan pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perbedaannya hanya terletak pada obyek saja.

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992:34) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.

Dari berbagai literature yang mengupas tentang kaum tani, diperoleh keterangan bahwa petani di negara kita dapat dikelompokkan menjadi empat pengertian, yakni petani besar, petani kecil, petani gurem, dan petani buruh/buruh tani (Sastraatmadja 2009).

Dari pendapat Sastraatmadja tersebut dapat dijelaskan klasifikasi petani secara rinci sebagai berikut:

- Petani tanpa lahan dan modal. Petani ini paling miskin, paling rentan, dia hanya memiliki tenaga kerja. Contohnya buruh-buruh, petani yang baru kena PHK dari perkotaan, petani yang dirundung malang sepanjang tahun, petani yang kena penggusuran dan sebagainya.
- Petani punya lahan sempit tanpa modal. Petani ini hanya memiliki lahan tempat berdiri rumah/gubuknya. Dia tidak dapat mengusahakan tanaman secara memadai, mungkin dapat memelihara ayam/bebek sebanyak 2-5 ekor saja. Profil petani ini sama saja dengan profil petani pada nomor 1. Petani nomor 1 dan 2 ini dapat dikembangkan dengan penanganan khusus, serius dan konsisten.
- Petani punya lahan sedang tanpa modal. Petani ini masih rendah produksinya karena tanpa modal dia susah berusaha-tani karena tak ada modal. Petani semacam ini dapat dikembangkan dengan memberikan bantuan modal dan penyuluhan.
- Petani punya lahan cukup/luas dan modal cukup/besar. Hanya jenis petani ini yang membutuhkan penyuluhan atau diberikan inovasi baru untuk mengembangkan usahatannya.

2. Pengertian Usaha Tani

Kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa disebut berproduksi, begitu pula dalam kegiatan usahatani yang meliputi sub-sektor kegiatan ekonomi pertanian tanaman pangan, perkebunan tanaman keras, perikanan dan peternakan adalah merupakan usahatani yang menghasilkan produksi. Untuk lebih menjelaskan pengertian usahatani dapat diikuti dari definisi yang dikemukakan oleh Moebiyarto (1997:41) yaitu usahatani adalah himpunan sumber-sumber alam yang terdapat pada sektor pertanian itu diperlukan untuk produksi pertanian, tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan di atas tanah dan sebagainya, atau dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tanah untuk kebutuhan hidup.

Menurut Soekartawi (1996:39) mendefinisikan usahatani sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara afektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Menurut Soekartawi (1996:24) menyatakan bahwa berhasil di dalam suatu kegiatan usahatani tergantung pada pengelolaannya karena walaupun ketiga faktor yang lain tersedia, tetapi tidak adanya manajemen yang baik, maka penggunaan dari faktor-faktor produksi yang lain tidak akan memperoleh hasil yang optimal.

Bagi seorang petani, analisa pendapatan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu usahatani yang dikelola dan pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan dapat dijadikan sebagai modal untuk memperluas usahatannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Patong (1995:14)

bahwa bentuk jumlah pendapatan mempunyai fungsi yang sama yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada petani agar dapat melanjutkan usahanya.

3. Pendapatan Petani

Pendapatan atau perolehan merupakan suatu kesempatan mendapatkan hasil dari setiap usaha yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan secara langsung diterima oleh setiap orang yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak langsung merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara (Bambang, S. 1994:121)

Menurut Muchdarsyah (2003:16) kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam seminar pendapan nasional dan salah satu pokok adalah batasan tingkat pendapatan untuk tingkat pendapatan untuk kriteria pendapatan rendah sedang dan tinggi sebagai berikut :

1. Kriteria untuk pendapatan rendah
 - a. Penduduk yang pendapatan rendah yaitu Rp. 1. 000.000-Rp. 10. 000.000. pertahun atau rata-rata Rp. 750. 000 perkapita perbulan.
 - b. Tidak memiliki pekrjaan tetap
 - c. Tiadak memiliki tempat tinggal tetep (Sewa)
 - d. Tingkat pendidikan yang tebatas
2. Kriteria untuk pendapatan sedang
 - a. Penduduk yang berpendapatan sedang yaitu Rp. 10. 000.000-Rp. 25.000.000 Rp. 1.250. 000.000 perkapita perbulan.
 - b. Memiliki pekerjaan tetep
 - c. Memiliki tepat tinggal yang sederhana.
 - d. Memiliki tingkat pendidikan.
3. Kriteria untuk pendapatan tinggi
 - a. Penduduk bependapatan tinggi yaitu Rp. 25. 000.000 Rp. 50. 000.000 atau rata-rata Rp2.083.333 perkapita perbulan.
 - b. Memiliki lahan dan lapangan kerja.
 - c. Memiliki tempat tinggal tetap.
 - d. Memiliki tingkat pendidikan

Menurut Boediono (1992:32) mengemukakan bahwa hasil pendapatan dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualan dari faktor-faktor yang dimiliki kepada faktor produksi. Jadi pendapatan adalah hasil penjualan faktor produksi atau aset yang dimilikinya.

Pendapatan petani dapat bermacam-macam sumbernya yaitu sektor formal berupa gaji atau upah yang diterima dan sektor informal berupa penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain. Sedangkan dalam sektor subsisten sendiri pendapatan petani adalah buah hasil dari usaha mereka sendiri. Sehingga pendapatan usahatani tergantung dari factor produksi tani, yang terdiri dari: (1) Penggunaan varietas unggul, (2) pemupukan seimbang, (3) pengolahan tanah, (4) pengairan yang baik, (5) pemberantasan hama dan penyakit, (6) penanganan pasca panen, (7) penggunaan lahan secara intensifikasi, (8) penggunaan peralatan dan mesin yang canggih dan modern, (9) peningkatan sumberdaya manusia, (10) penambahan modal usaha. Kesepuluh factor produksi tersebut menentukan tingkat kemiskinan petani serta usaha tani (Ginting. 2004).

4. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua. (Trimo, 2006). Kelompok tani menurut Anonim dalam Mardikanto diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga



atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. (Mardikanto, 1993).

Kelompok tani pada dasarnya merupakan sistem sosial yaitu suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat oleh kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam kelompok ini akan terjadi suatu situasi kelompok dimana setiap petani anggota telah melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. (Samsudin, 1993).

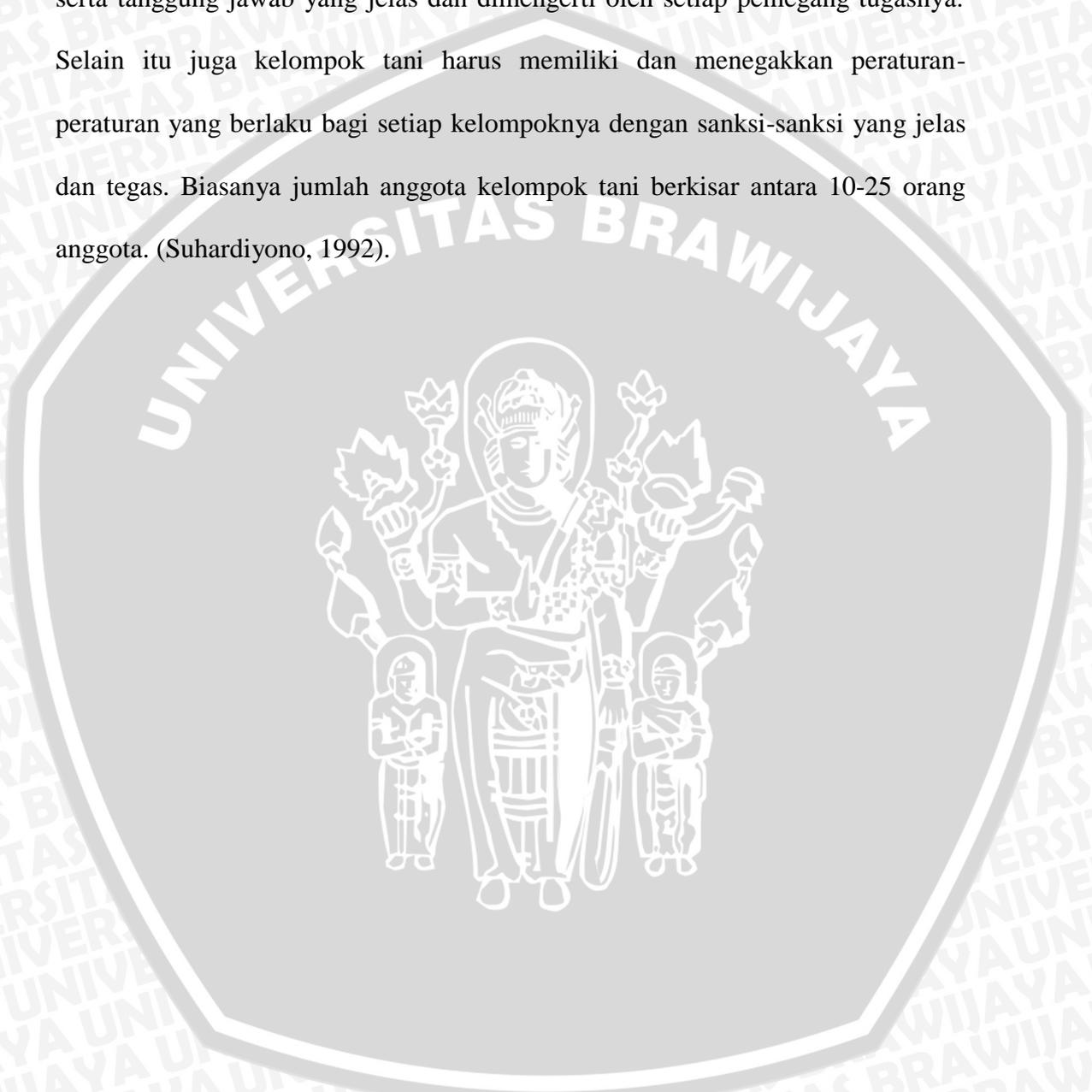
Suhardiyono menyatakan bahwa untuk meningkatkan dinamika kelompok tani harus dikembangkan sepuluh jenis kemampuan kelompok tani yang disebut dengan sepuluh jurus kemampuan kelompok tani yang terdiri atas : (1) menyusun rencana kerja kelompok tani, (2) kerjasama intern kelompok tani, (3) menerapkan teknologi baru, (4) memecahkan masalah kelompok dan mengatasi keadaan darurat, (5) pemupukan modal usaha, (6) kemampuan mengembangkan peralatan dan fasilitas kelompok, (7) membina hubungan melembaga dengan KUD, prosesor, eksportir, perbankan dan instansi terkait, (8) peningkatan produktivitas usaha tani, (9) ketaatan terhadap perjanjian, dan (10) pembinaan kader pimpinan kelompok. (Suhardiyono, 1992).

Kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani yaitu sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada





disesuaikan dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah anggota kelompok tani berkisar antara 10-25 orang anggota. (Suhardiyono, 1992).





BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan sebuah pilihan bagi peneliti untuk digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Kemudian Whitney mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini sesuai untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dengan tepat dan apadanya. Bogdan & Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai “produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moelong, 2002:3). Pendekatan kualitatif merupakan metode pencatatan atas pengamatan dan fakta yang berhasil dilihat dan memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002:81-82), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, pembatasan masalah melalui fokus, disamping itu diperlukan





sebagai kriteria inklusi-eksklusi. Sifat perumusan masalah sebelum penelitian akhirnya tentatif, yang berarti masih dapat berkembang sekaligus disempurnakan sewaktu peneliti sudah berada dilapangan. Kedua, memberikan gambaran lengkap mengenai berbagai cara dan gaya dalam merumuskan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi batasan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (*Studi pada Kelompok Tani di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek*):

- Pengoperasian Program Pengelolaan Tanaman Terpadu pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
 - a. Organisasi
 - b. Interpretasi
 - c. Penerapan
- Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan
 - a. Aspek Lingkungan
 - b. Aspek Sosial-Budaya
 - c. Aspek Ekonomi



2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan:
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah keseluruhan ruang dimana obyek ditangkap. Sedangkan situs penelitian adalah letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian. Kecamatan Munjungan di Kabupaten Trenggalek menjadi pilihan peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian ini antara lain karena :

1. Pertanian adalah mata pencaharian utama bagi kebanyakan penduduk Kecamatan Munjungan.
2. Lokasi yang dekat dengan peneliti memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data.

Sedangkan situs penelitiannya adalah Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dimana terdapat Program Pengelolaan Tanaman Terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok tani (Poktan) yang dedampingi oleh petugas penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Kehutanan, dan Perkebunan Trenggalek Sebagai instansi yang menangani program SL-PTT itu sendiri, serta Badan Penyuluh Kecamatan Munjungan Sebagai organisasi yang memandu petani peserta program SL-PTT. Dari situs inilah peneliti mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Secara umum situs penelitian diatas atas pertimbangan sebagai berikut :



1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interaksi dan sebagainya, yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam.
3. Sebagai desa yang berhasil meningkatkan pendapatan petani pada program Pengelolaan Tanama Terpadu.

D. Sumber Data

Sumber data sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam membuat kesimpulan, agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Arikunto (2006:129) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder (Marzuki,1983:55-56). Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara, *informan* di lapangan dan pengamatan langsung dengan pihak yang terkait yaitu:
 - a. Bapak Ir. Heru Saptono selaku Ketua Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek berperan sebagai operasional pelaksana SL-PTT di tingkat Kabupaten.



- b. Bapak Suhariyono selaku Ketua Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan berperan sebagai penanggung jawab di bidang teknis SL-PTT se Kecamatan Munjungan.
- c. Bapak Khairul Anam selaku Mantri Tani dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat kecamatan.
- d. Bapak M. Martajudin Nur, S.Pt selaku Penyuluh Lapangan berperan sebagai pelaksana teknis SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur
- e. Bapak Nur Tamam selaku Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan berperan sebagai petani penerima program SL-PTT.

2. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dari dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, catatan-catatan, dan data-data lainnya yang mendukung data primer sehingga batasan data sekunder mencakup data yang mendukung isi dan pembahasan yang terkait penelitian.

Data sekunder yang didapat selama penelitian adalah:

- a. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan





Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 diperoleh dari Mantri Tani Kecamatan Munjungan

- b. Laporan Pengkajian Jarak Tana Terhadap Produksi Padi Sawah (*Oryza Sativa L.*) Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek diperoleh dari Penyuluh Lapangan Kelompok Tani Singgih Makmur
- c. Laporan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tahun 2011 diperoleh dari Mantri Tani Kecamatan Munjungan
- d. Data dasar Kelompok Tani Singgih Makmur diperoleh dari penyuluh lapangan Desa Masaran
- e. Petunjuk Teknis (Juknis) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi 2010 diperoleh dari Mantri Tani Kecamatan Munjungan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena dapat mempermudah peneliti dalam menghimpun informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan





pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2007). Adapun Pihak-Pihak yang diwawancarai adalah:

- a) Ketua Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan. Pihak ini diwawancarai tentang peraturan yang mendasari pelaksanaan program, pelaksanaan program secara umum, serta faktor pendukung dan penghambat program ini.
- b) Mantri Tani Kecamatan Munjungan selaku kepanjangan tangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan. Pihak ini diwawancarai tentang bagaimana pelaksanaan program PTT itu sendiri.
- c) Badan Penyuluh Kecamatan Munjungan sebagai kepanjangan tangan Bapelluh. Pihak ini diwawancarai tentang bagaimana pelaksanaan Program SL-PTT ini di lapangan.
- d) Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek selaku obyek kelompok tani yang diamati. Pihak ini diwawancarai tentang apa yang telah didapat selama pelaksanaan program SL-PTT

2. Dokumentasi

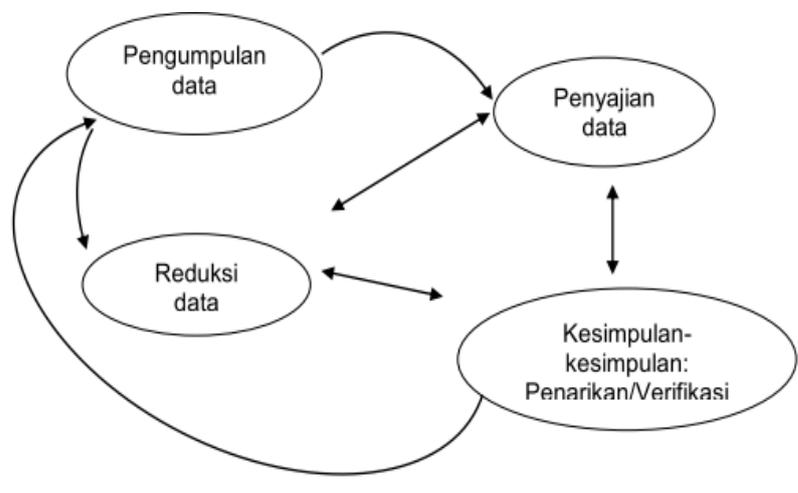
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan *forecasting*. Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data.



F. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang masih mentah sehingga memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilaksanakan dengan jalan menggambarkan, melukiskan dan menguraikan secara mendalam keadaan yang sebenarnya di lapangan atau peristiwa yang terjadi. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992:20) analisis kualitatif meliputi: *data collection period, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification*. Adapun Model Analisis Interaktif Kualitatif adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992:20)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau *data collection period* merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan.





Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci dalam hal ini adalah petani sebagai pelaksana, penyuluh pertanian sebagai pendamping program Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan dokumentasi data sekunder.

2. Reduksi Data

Reduksi data atau *data reduction* mengarah pada satu proses memilih (*process of selecting*), memfokuskan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data yang muncul yang terdapat dalam transkrip (*fieldnotes*) yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan..

3. Penyajian Data

Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data dan sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

Peneliti dalam proses ini berupaya menentukan batasan penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan





melihat penyajian-penyajian didapat pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dengan mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penarikan

Kesimpulan Data

4. Penarikan kesimpulan

Conclusion drawing/verification merupakan tahap keempat dari model analisis data. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep paling penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Teknik keabsahan data dalam penilain ini adalah tringulasi data. Menurut Moleong (2007:187), tringulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian dilapangan, pada waktu yang berlainan dengan tiga macam





teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori.

Oleh karena itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengecek dengan berbagai sumber data atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dalam penelitian dapat dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum daerah penelitian merupakan deskripsi secara umum atas perkembangan wilayah sebagai obyek penelitian. Gambaran tersebut menunjukkan berbagai keterkaitan obyek penelitian yang disampaikan. Hal tersebut juga menunjukkan data secara umum yang dapat memberikan atau mendukung atas uraian selanjutnya. Gambaran umum ini menyangkut beberapa hal di bawah ini:

1. Profil Kecamatan Munjungan

a. Kondisi Geografis

Secara umum Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang dirinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2: Luas Kecamatan di Trenggalek

Kode Wil.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase terhadap luas kabupaten (%)
3503010	Panggul	131,56	10,43
3503020	Munjungan	154,80	12,27
3503030	Watulimo	154,44	12,24
3503040	Kampak	79,00	6,26
3503050	Dongko	141,20	11,19
3503060	Pule	118,12	9,36
3503070	Karangan	50,92	4,04
3503071	Suruh	50,72	4,02
3503080	Gandusari	54,96	4,36
3503090	Durenan	57,16	4,53
3503100	Pogalan	41,80	3,31
3503110	Trenggalek	61,16	4,85
3503120	Tugu	74,72	5,92
3503130	Bendungan	90,84	7,20
3503000	Kab. Trenggalek	1.261,40	100,00

Sumber: Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2013

Kecamatan Munjungan terletak di 111°27'46" – 111°39'40" Bujur Timur dan 8°22'19" – 8°42'13" Lintang Selatan. Berdasarkan batas administrasi wilayah Kecamatan Munjungan dibatasi oleh:

- Sebelah utara : Kecamatan Kampak
- Sebelah timur : Kecamatan Watulimo
- Sebelah selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah barat : Kecamatan Panggul dan Kecamatan Dongko

Kecamatan Munjungan dibagi menjadi 11 (sebelas) desa, yaitu: Ngulungwetan, Ngululungkulon, Sobo, Craken, Masaran, Munjungan, Tawing, Bendoroto, Bangun, Karangturi, dan Besuki.

Kecamatan Munjungan 35% adalah daerah datar dan 65% adalah daerah pegunungan. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, Kecamatan Munjungan terletak pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut dan kemiringan daratan berkisar antara 0-40% dengan kecenderungan menurun miring ke arah selatan.

Seperti wilayah Kabupaten Trenggalek pada umumnya di Kecamatan Munjungan mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau bisaanya jatuh pada bulan mei sampai agustus sedangkan musim hujan jatuh pada bulan september sampai april. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 56 mm/tahun dengan suhu rata-rata adalah 22°-40° celcius.

b. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012, luas desa, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di Kecamatan Munjungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Kepadatan Penduduk di Kecamatan Munjungan

No.	Desa	Luas Desa (KM ²)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
1.	Ngulungwetan	56	641	2.533	45,20
2.	Ngulungkulon	99	631	2.867	28,98
3.	Sobo	67	576	2.747	40,79
4.	Craken	171	752	3.236	18,98
5.	Masaran	153	2.117	8.432	55,24
6.	Munjungan	87	1.756	6.525	75,26
7.	Tawing	124	1.718	7.377	59,62
8.	Bendoroto	318	724	2.972	9,36
9.	Bangun	199	1.201	3.874	19,50
10.	Karanturi	110	1.463	6.352	57,53
11.	Besuki	165	1.424	7.982	48,24
Jumlah		1.548	13.003	54.897	35,46

Sumber: Kecamatan Munjungan Dalam Angka 2013

Ditinjau dari kepadatan penduduk desa dengan kepadatan penduduk terendah yaitu desa Desa Bendoroto yaitu 9,36 jiwa/km² sedangkan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Desa Munjungan dengan kepadatan penduduk 75,26 jiwa/km². Untuk lokasi penelitian sendiri dilaksanakan di Desa Masaran yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi yaitu 8.432 jiwa hal ini dikarenakan topografi Desa Masaran sebagian besar merupakan daerah datar.

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat Desa Masaran secara mayoritas diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Masaran

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	perempuan
1.	Petani	2.100	418
2.	Buruh tani	700	217
3.	Pegawai negeri sipil	56	40
4.	Pengrajin industry rumah tangga	57	31
5.	Tukang batu/kayu	131	
6.	Peternak	361	113
7.	Nelayan	225	-

Sumber: Profil Desa Masaran 2013

Penduduk Desa Masaran secara mayoritas mengandalkan mata pencahariannya dari sektor pertanian, peternakan, dan nelayan. Hal ini dikarenakan Desa Masaran adalah salah satu desa yang mempunyai wilayah pertanian terluas khususnya padi serta letak desa yang berada di pesisir pantai.

c. Kondisi pertanian

Kondisi hidrologi di wilayah Kecamatan Munjungan sangat dipengaruhi oleh adanya Sungai Tumpaknongko; Sungai Gembes; Sungai Ngampo; dan Sungai Blimbing, keempat sungai tersebut bermuara di Sungai Blado. Dengan adanya sungai-sungai tersebut, sangat membantu pengairan pertanian sehingga tanah pertanian di wilayah Kecamatan Munjungan cukup subur. Demikian pula ketersediaan air tanah, untuk air bersih dapat tercukupi dengan baik. Sedangkan jenis batuan yang terkandung di wilayah Kecamatan Munjungan adalah batuan mediteran, sedangkan jenis tanahnya adalah aluvial kelabu dengan tekstur tanahnya sedang.

Timbulnya berbagai jenis penggunaan tanah adalah sebagai akibat dari kegiatan manusia yang beraneka ragam. Jenis penggunaan tanah yang ada di Kecamatan Munjungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabe 5: Jenis Penggunaan Tanah

No	Jenis penggunaan tanah	Luas (ha)	Presentase (%)
1.	Sawah	824	5,3
2.	Tegal	2.601	16,8
3.	Tanah bangunan dan sekitarnya	1.383	8,9
4.	Hutan Negara	10.595	68,5
5.	Lain-Lain	77	0,5
	Jumlah	15.595	100

Sumber: Kecamatan Munjungan Dalam Angka 2013

Ditinjau dari penggunaan tanahnya di Kecamatan Munjungan ada beberapa jenis yaitu sawah, tegal, pekarangan, hutan negara dan lain-lain. Sawah adalah suatu bidang tanah yang dikelilingi oleh tanggul rendah, selama beberapa waktu digenangi oleh air dan ditanami padi, penggunaan tanah untuk sawah seluas 824 ha. Tegal adalah suatu bidang tanah pertanian dimana *suplay* airnya untuk tanaman sangat tergantung hujan di daerah itu dan tanpa adanya pemupukan buatan, di Kecamatan Munjungan penggunaan tanah untuk tegal seluas 2601 ha. Tanaman yang dibudidayakan antara lain ketela pohon, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Luas pekarangan di daerah penerlitan adalah 1382 ha (termasuk bidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan), tanaman budidayanya seperti: Tanaman sayuran, kelapa, cengkeh, durian, manggis, kakao dan untuk perkandangan ternak, kolam. Sedangkan hutan negara dengan luas 10.595 ha merupakan hutan dengan tanaman keras.

Dilihat dari pola tanam usaha tani di Kecamatan Munjungan sebagai berikut:

Tabel 6: Pola Tanam Usaha Tani di Kecamatan Munjungan

Lahan	Musim penghujan (MP)	Musim kemarau I (MK I)	Musim Kemarau II (MK II)
Lahan Sawah	Padi	Padi	Padi
	Padi	Padi	Padi
	Padi	Padi	Padi
	Padi	Padi	Padi
Lahan Kering	Padi	Padi	Palawija
	Jagung/Ketela Pohon	-	-
	Disamping tanaman semusim pada lahan kering, ada tanaman tahunan (tanaman perkebunan dan tanaman kayu-kayuan sebagai vegetasi)		
Lahan Pekarangan	Tanaman sayuran, kelapa, cengkeh, durian, manggis, kakao dan untuk perkandangan ternak, kolam		

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian Munjungan 2013

Pola tanam petani di Kecamatan Munjungan untuk lahan sawah terutama sawah yang teririgasi monoton yaitu padi, jika tanaman padi tidak memberikan hasil maksimal kebanyakan petani pindah untuk mengelola tegal atau pekarangan mereka hal ini sering terjadi ketika MK II dikarenakan kesulitan mendapatkan antrian air irigasi walaupun ada beberapa petani yang mengupayakan pemompaan air tanah untuk irigasi sawah mereka masing-masing.

Secara spesifik luas lahan sawah yang ada di Kecamatan Munjungan adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Luas Tanah Sawah Perdesa di Munjungan

No	Desa	Luas Lahan sawah				
		Teknis (Ha)	½ teknis (Ha)	Sederhana (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Total (Ha)
1.	Ngulungwetan	-	-	31.47	11.70	43.17
2.	Ngulungkulon	-	-	4.19	14.00	18.19
3.	Sobo	-	-	1.50	-	1.50
4.	Craken	-	-	43.50	19.12	62.62
5.	Masaran	-	78.00	128.00	47.65	253.65
6.	Munjungan	-	-	136.69	12.78	149.47
7.	Tawing	-	-	113.80	58.50	172.30
8.	Bendoroto	-	-	27.21	10.00	37.21
9.	Bangun	-	-	26.71	-	26.71
10.	Karangturi	-	-	61.05	3.50	64.55
11.	Besuki	-	-	18.50	1.00	19.50
	Jumlah	-	78.00	592.62	178.25	848.87

Sumber: Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan 2013

Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dengan saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air ke lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Ciri-ciri sawah yang beririgasi teknis adalah seluruh saluranv air (saluran primer, sekunder, dan tersier) dibangun dengan bangunan



permanen dan ada mata air yang tetap serta saluran ini dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Lahan sawah irigasi setengah teknis sama halnya dengan irigasi teknis hanya yaitu adanya mata air yang jelas serta adanya saluran primer, sekunder, dan tersier. Hal yang membedakan adalah bangunan permanen hanya terdapat pada saluran primer saja dan saluran ini tidak dikuasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Luasan lahan sawah yang beririgasi setengah teknis yaitu seluas 78,00 Ha.

Lahan sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari bendungan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum tetapi bangunannya tidak permanen mulai dari primer sampai tersier. Luasan lahan sawah yang diari irigasi ini adalah 592.62 Ha. Sedangkan lahan sawah tadah hujan adalah sawah yang seluruh pengairannya berdasarkan air hujan. Luasan lahan tadah hujan ini adalah 178.25 Ha.

2. Profil Dinas Pertanian Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

a. Visi dan Misi

Visi Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah: “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Revitalisasi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang Berorientasi Agribisnis, Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”.



Penjabaran visi tersebut antara lain:

1. Terwujudnya dalam arti melaksanakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan sebagai motifator / penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Kesejahteraan adalah suatu keadaan dari jiwa masyarakat yang sehat, aman sentosa, makmur dan tenteram serta terlepas dari segala macam ancaman dan gangguan;
3. Revitalisasi pertanian kehutanan dan perkebunan adalah mengembalikan peran serta yang sangat penting dibidang pertanian, kehutanan dan perkebunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
4. Berorientasi agribisnis adalah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat memiliki kemampuan professional untuk meningkatkan produktivitas yang selaras dengan perkembangan teknologi dan peluang pasar;
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
6. Pemberdayaan masyarakat adalah mendayagunakan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam yang ada demi meningkatkan kesejahteraannya;
7. Berwawasan lingkungan adalah selalu disiplin dan tertib dalam pendayagunaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, penghematan sumberdaya alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Guna mewujudkan Visi Dinas Pertanian Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemampuan/ketrampilan sumberdaya manusia, aparat dan petani serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Mewujudkan alih teknologi, peningkatan ketahanan pangan dan kemitraan;
3. Mewujudkan kemampuan/ketrampilan pelaku usaha perkebunan ,peningkatan produksi dan mutu serta mendukung industry pengolahan hasil secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemampuan/Ketrampilan pelaku usaha, peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura berkelanjutan.
5. Mewujudkan Pelestarian Fungsi Hutan Yaitu Fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial

b. Tugas, Pokok, dan Fungsi

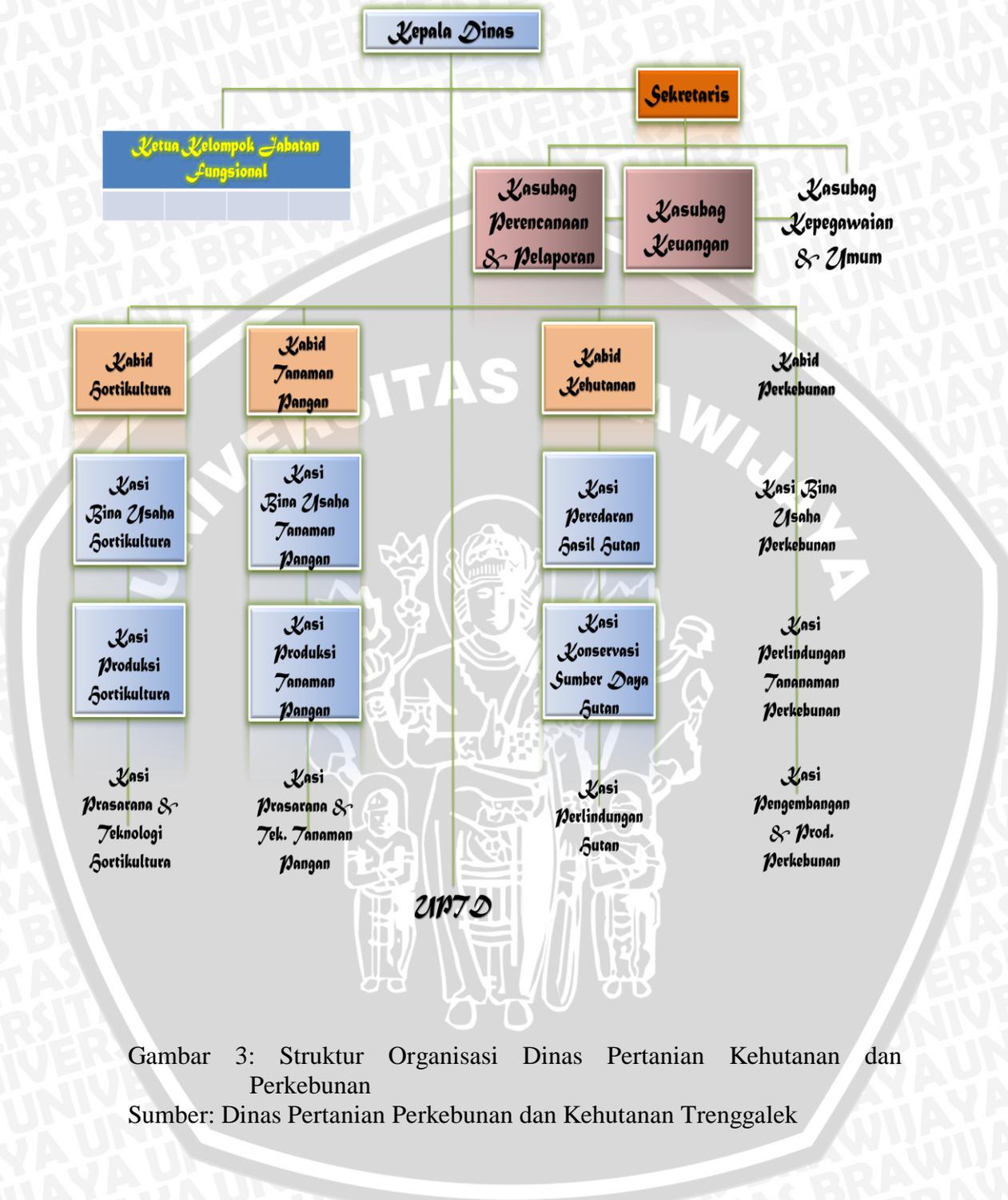
Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, kedudukan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan serta pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan;
5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangan daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta kehutanan dalam lingkup tugasnya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 83 Tahun 2008 pasal 6 tentang Susunan organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Trenggalek



Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, seluruh jabatan struktural telah terisi.

Tabel 8. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Golongan

N O	Golongan	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	57 Orang
3	Golongan II	16 Orang
4	Golongan I	3 Orang
Jumlah		82 Orang

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Trenggalek

Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N O	Tingkat Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI
1	SD	2 Orang
2	SLTP	2 Orang
3	SLTA	31 Orang
4	D3	1 Orang
5	S1	42 Orang
6	S2	4 Orang
Jumlah		82 Orang

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Trenggalek

3. Profil Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kecamatan Munjungan

a. Letak

Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan berada pada sekitar 48 KM dari pusat Kota Trenggalek, sedangkan jarak desa terjauh dengan kota kecamatan 18 KM dan batas wilayah Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kampak
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Watulimo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paggul dan Dongko

b. Tugas dan Fungsi

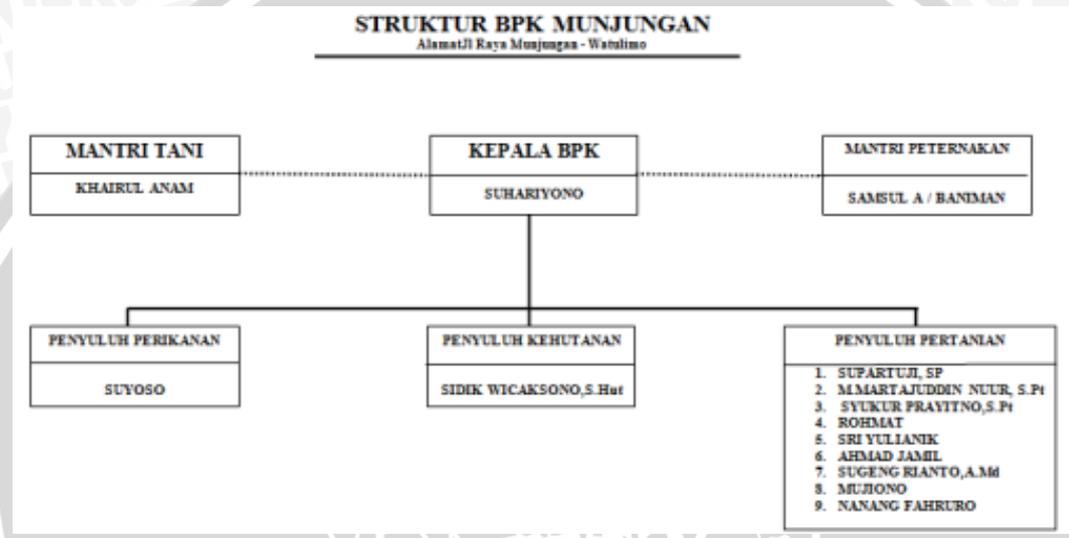
Menurut PERBUP No 138 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek, Balai Penyuluhan Kecamatan secara struktural merupakan bagian dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan pimpinannya bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP4K dan dalam Perbup ditegaskan bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana operasional BP4K di wilayah Kecamatan.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat Kecamatan. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten.
2. Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan program penyuluhan.
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
4. Memfasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

- 6. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.
- 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

c. Struktur Organisasi



Gambar 4: Struktur BPK Munjungan

Sumber: BPK Munjungan

Ketenagaan Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan fungsi penyuluhan.

Ketenagaan BPK Munjungan adalah sebagai berikut:



Tabel 10: Ketenagaan BPK Munjungan

No	Nama	Pendidikan	Unit Kerja	Keterangan
1.	Suhariyono	SPMA	BPK Munjungan	Kepala BPK
2.	Supartuji, SP	Sarjana Pertanian	BPK Munjungan	Penyuluh Pertanian
3.	M. Martajudin Nuur, S.Pt	Sarjana Peternakan	BPK Munjungan	Penyuluh Pertanian
4.	Syukur Prayitno, S.Pt	Sarjana Peternakan	BPK Munjungan	Penyuluh Pertanian
5.	Sidik Wicaksono, S.Hut	Sarjana Peternakan	BPK Munjungan	Penyuluh Kehutanan
6.	Suyoso	SLTA	BPK Munjungan	Penyuluh Perikanan
7.	Samsul Anam	SNAKMA	Dinas Peternakan	Mantri Ternak
8.	Baniman	SMT Pertanian	Dinas Peternakan	Petugas IB
9.	Mujiono	SMT Pertanian	BPK Munjungan	THL-TBPP
10.	Ahmad Jamil	SMT Pertanian	BPK Munjungan	THL-TBPP
11.	Nanang Fahrurro	SMT Pertanian	BPK Munjungan	THL-TBPP
12.	Rohmat	SPP	BPK Munjungan	THL-TBPP
13.	Sri Yulianik	SPP	BPK Munjungan	THL-TBPP
14.	Sugeng Rianto	D3 Pertanian	BPK Munjungan	THL-TBPP
15.	Khairul Anam	D1 Pertanian	Dinas Pertanian	POPT
16.	Khairul Anam	D1 Pertanian	Dinas Pertanian	Mantri Tani

Sumber : BPK Munjungan

4. Profil Kelompok Tani Singgih Makmur

Kelompok Tani Singgih makmur berdiri pada tanggal 3 agustus tahun 2007, Nomor registrasi Kelompok Tani Singgih Makmur adalah 411.61/03.020.005.066/406.087/2009. Alamat secretariat berada pada RT. 21 RW. 24 Dusun Singgihan Desa Masaran. Jumlah anggota yang terdaftar untuk kegiatan SL-PTT adalah 64 orang yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 54 orang laki-laki.

Jenis kegiatan Kelompok Tani Singgih Makmur berupa budidaya tanaman pangan dan saprodi (sarana produksi padi). Luas lahan keseluruhan anggota

kelompok adalah sebagai berikut: lahan sawah 27,902 ha; tegal 39,859 ha; pekarangan 20,240 ha; hutan 63 ha. Jadi keseluruhan jumlah luas lahan anggota kelompok adalah 151,001 ha.

Pengurus Kelompok Tani Singgih Makmur adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Nur tamam
- b. Sekretaris : Imam Muksin
- c. Bendahara: Sutarman

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

a. Pengoperasian Program Pengelolaan Tanaman Terpadu pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran

1) Organisasi

Maksud organisasi di sini adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program SL-PTT. Organisasi yang bertanggung jawab dalam terlaksanannya program SL-PTT ini Bapak Khairul Anam selaku mantri tani merangkap petugas Pembasmi Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) menerangkan bahwa:

“Sebenarnya kegiatan SL-PTT itu adalah program APBN. Jadi untuk pemerintahan Kabupaten Trenggalek tidak ada peraturan yang mengatur tentang SL-PTT. sebenarnya basis SL-PTT ini adalah Bansos (Bantuan Sosial) dan dananya langsung ke rekening kelompok. Kalau peraturan di tingkat kabupaten yang ada hanya berkaitan tentang pembentukan tim pelaksana saja. Untuk juknis masih mengacu pada juknis tahun 2010, seharusnya juknis itu setiap tahun dinas harus mengeluarkan tetapi selama dinas tidak mengeluarkan ya yang dipakai juknis tahun 2010.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Adapun Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007. Berisi sebagai Berikut:

1. Posko III (tingkat kabupaten)

Posko III berada pada Dinas Pertanian Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Bidang Tanaman Pangan dan mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengatur kerjasama dan mengintegrasikan serta mensinkronisasi seluruh administrasi gerakan P2BN di tingkat kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan gerakan peningkatan produksi beras secara terkoordinasi dan terpadu;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas yang terkait dengan ketersediaan lahan, penerapan teknologi, dampak iklim, infrastruktur pertanian, sarana produksi, akses permodalan petani, pengelolaan stok beras, kelembagaan pertanian, dan kegiatan lain gerakan peningkatan produksi beras;
- d. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi sasaran dan realisasi tanam dan panen, prasarana dan sarana produksi, dukungan permodalan, dukungan pasca panen serta pemasaran dan pengolahan hasil;
- e. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan memberikan saran penyelesaian masalah;
- f. Menyusun pedoman pelaksanaan gerakan peningkatan beras nasional di tingkat kabupaten;

- g. Menyusun bahan arahan untuk tim koordinasi kecamatan dan kelurahan/desa dalam rangka peningkatan produksi beras nasional;
 - h. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras nasional di tingkat kabupaten secara berkala;
 - i. Melakukan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan produksi beras.
2. Posko IV (tingkat kecamatan)

Posko IV berada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Kantor Kecamatan dan mempunyai tugas wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mensinkronisasikan kegiatan P2BN di tingkat kecamatan;
- b. Mengkompilasi CP/CL P2BN;
- c. Mengkompilasi hasil pencatatan realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas (ubinan), produksi, penggunaan pupuk serta penggunaan benih di tingkat desa;
- d. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan memberikan saran penyelesaian masalah;
- e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras Nasional di tingkat kecamatan secara berkala;

3. Posko V (Tingkat Kelurahan/Desa)

Posko V berada pada kantor desa/kelurahan dan mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan P2BN di tingkat kelurahan/desa;
- b. Menginventarisir CP/CL P2BN;
- c. Mengkoordinir dan membantu penyusunan RUK dan RDKK;

- d. Melakukan pencatatan realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi serta penggunaan pupuk dan penggunaan benih;
- e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras nasional di tingkat kelurahan/desa secara berkala.

Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) ini masih bersifat umum, maksudnya dalam mencapai sasaran Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) itu maka strategi yang diterapkan ada empat yaitu: a) peningkatan produktivitas; b) peningkatan areal tanam; c) pengamanan produksi; dan d) pemberdayaan dan dukungan biaya serta peningkatan koordinasi. Strategi inti dari program SL-PTT sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Juknis SLPTT Padi Tahun 2010 dalam pengorganisasian SL-PTT, penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT tingkat kabupaten/kota adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, operasionalisasi pelaksanaan SL-PTT ditingkat kabupaten/kota adalah Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT di tingkat kecamatan adalah mantri pertanian sedangkan penanggung jawab teknis di setiap kecamatan adalah Koordinator Penyuluh/Kepala BPP (Balai Penyuluh Pertanian) setempat dan di tingkat desa/unit SL-PTT adalah pemandu lapangan/penyuluh pertanian dibantu POPT tingkat kecamatan/desa.

Secara teknis berikut ini adalah jumlah kelompok tani di kecamatan munjungan yang mengikuti program SL-PTT:

Tabel 11: Kelompok Tani Munjungan yang Terdaftar dalam SL-PTT

No	Desa	Kelas Kelompok Tani				Jumlah poktani	Jumlah Gapoktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
1.	Ngulungwetan		3			3	1
2.	Ngulungkulon		3	1		4	1
3.	Sobo	1	2			3	1
4.	Craken		5	1		6	1
5.	Masaran	6	3	1		10	1
6.	Munjungan		7	2		9	1
7.	Tawing	3	3	2		8	1
8.	Bendoroto	1	3			4	1
9.	Bangun	3	1			4	1
10.	Karangturi		3			3	1
11.	Besuki		5			5	1
	Jumlah	14	38	7		59	11

Sumber: BPK Munjungan

Adapun Penyuluh Lapang tiap desa sebagai berikut:

Tabel 12: Penyuluh Tani dan Desa Binaannya

No	Desa	Penyuluh
1.	Ngulungwetan	Muh. Martajuddin Nuur, S. Pt
2.	Ngulungkulon	Ahmad Jamil
3.	Sobo	Muh. Martajuddin Nuur, S. Pt
4.	Craken	Rohmat
5.	Masaran	Supartuji, SP
6.	Munjungan	Sri Yulianik
7.	Tawing	Syukur Prayitno, S.Pt
8.	Bendoroto	Supartuji, SP
9.	Bangun	Mujiono
10.	Karangturi	Nanang Fahruro
11.	Besuki	Sugeng Rianto, A.Md

Sumber: BPK Munjungan

Agar pelaksanaan SL-PTT dapat dijalankan secara lancar maka untuk meningkatkan kapasitas penyuluh lapangan setiap desa, Bapak Muh. Martajuddin Nuur memaparkan sebagai berikut:

“Untuk SL-PTT tahun 2012 pelatihan teknis dilaksanakan di Bapeluh Kabupaten pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi cara mengajar di lapangan, untuk tahun-tahun berikutnya Bapeluh tidak lagi mengadakan

pelatihan. Pertemuan rutin di tingkat kecamatan dilaksanakan di BPK Munjungan setiap minggu paling sering pada hari jumat, pertemuan ini ditujukan untuk membahas program-program yang dilaksanakan oleh BPK baik berkaitan dengan SL-PTT ataupun program dari Bapeluh sendiri.” (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Adapun alasan pelatihan petugas lapangan hanya berakhir pada tahun 2012, Bapak Khairul Anam memaparkan sebagai berikut:

“Dari seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT ini berkaitan dengan dana yang disediakan APBN dalam pelaksanaan SL-PTT itu sendiri yang berkisar antara Rp 1.700.000-an untuk setiap kelompok tani penerima program SL-PTT. Menurut saya sendiri SL-PTT merupakan program yang *bottom-up* yang biasanya dimulai dengan perencanaan tetapi dalam pelaksanaan SL-PTT ini bersifat *top-down* sehingga dana untuk kegiatan SL-PTT sangat tergantung dari APBN, tidak adanya pelatihan dikarenakan untuk melaksanakan pelatihan di Bapeluh sendiri harus mengeluarkan dana untuk pelatihan, sedangkan SL-PTT bukan merupakan program bawaan dari Bapeluh melainkan program nasional yang dilewatkan dinas pertanian masing-masing kabupaten tiap provinsi.” (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

2) Interpretasi

Menurut Bapak Khairul Anam tahap-tahap yang dilaksanakan dalam SL-PTT secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

“Pertama yaitu penentuan calon lokasi yang telah dilaksanan sekali pada tahun 2008 setelah itu penentuan petani yang mendiami lokasi yang telah ditunjuk. Tahap selanjutnya yaitu mengirimkan data calon lokasi dan petani ke dinas pertanian, penyusunan rencana kelompok yang mendiami lokasi sambil menunggu anggaran turun. Setelah itu kontrak belajar dengan penyuluh lapangan dan di sesi akhir ada rencana tindak lanjut berupa ubinan hasil SL-PTT.” (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Penjabaran terperinci dari pemaparan diatas menurut Juknis SL-PTT 2010 adalah sebagai berikut:

a. Penentuan calon lokasi:

1. Lokasi dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering dan lahan pasang surut yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan.

2. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir, dan sengketa.
3. Unit SL-PTT diusahakan agar berada dalam satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani.
4. Letak laboratorium lapang (LL) seluas minimal 1 Ha, ditempat yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya.

b. Kriteria Calon Petani:

1. Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang berdekatan
2. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru.
3. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.
4. Kelompok tani SL-PTT ditetapkan dengan keputusan surat kepala dinas diperhutbun trenggalek.

c. Ketentuan pelaksanaan SL-PTT

1. Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan, mempunyai potensi peningkatan produktivitas dan anggota kelompoknya responsif terhadap penerapan teknologi.
2. Luas satu unit SL-PTT padi hibrida adalah 10 ha, padi nonhibrida 25 ha dan padi gogo 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
3. Luas satu unit SL-PTT diatas dapat disesuaikan pada kondisi luasan setempat, dengan ketentuan:
 - Luasan setiap unit slptt bisa bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat namun total luasan dan unit SL-PTT tidak boleh kurang dari

yang dibiayai.

- Total luasan dan unit SL-PTT bisa lebih dari yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun unit SL-PTT ditanggung anggaran lain ataupun swadana petani.
- Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila dananya masih memungkinkan tetapi tidak boleh kurang dari 1 ha.

4. Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15-25 petani yang berasal dari satu kelompok tani yang sama, namun jumlah peserta dapat disesuaikan dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi setempat.

5. Memiliki pemandu lapangan.

d. Persyaratan kelompok tani pelaksana SL-PTT

1. Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Telah menyusun RUK.
3. Kelompok tani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian kabupaten/kota.
4. Kelompok tani peserta SL-PTT diutamakan yang belum pernah menerima bantuan SL-PTT sebelumnya.
5. Memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di bank pemerintah (BUMN/BUMD) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus membuka rekening di bank tersebut.
6. Rekening bank bisa rekening bank kelompok tani ataupun rekening bank gabungan kelompok tani (gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani dan jumlah kelompok yang

gabung rekeningnya ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi kabupaten setempat serta diatur lebih lanjut oleh kepala dinaskab/kota yang bersangkutan.

7. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai dengan peruntukannya.
8. Bersedia menambahkan biaya pembelian benih unggul bersertifikat bilamana bantuan benih yang tersedia tidak mencukupi.
9. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.

Para pelaksana program di sini dititik beratkan pada para penyuluh lapangan yang terkoordinir pada Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Munjungan. Sebelum pelaksanaan SL-PTT itu dilaksanakan di setiap kelompok tani maka beberapa hal yang harus terlaksana seperti yang dikatakan Bapak Haryono selaku Kepala Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan sebagai berikut:

“Ada beberapa hal yang ada dalam buku petunjuk teknis itu di lewat seperti penetapan lokasi karena SL-PTT pada tahun 2012 itu bukan pertama kalinya di kelompok tani itu. Proses pengajuan SL-PTT oleh kelompok tani harus didampingi oleh penyuluh lapang masing-masing kelompok tani untuk mendapatkan persetujuan mantri tani, setelah itu mantri tani akan mengajukan proposal SL-PTT kepada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan. Setelah program turun maka penyuluh mengadakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten dengan Bapeluh Trenggalek. Sedangkan untuk rapat koordinasi ditingkat kecamatan, Kecamatan Munjungan ikut dengan Kecamatan Panggul karena dari pihak Bapelluh Trenggalek hanya menunjuk tiga Balai Penyuluh Kecamatan sebagai tempat koordinasi bagi kecamatan. Banyak kesulitan yang terjadi pada saat itu ketika rapat koordinasi dilaksanakan di Kecamatan Panggul salah satunya jarak yang ditempuh cukup jauh serta akses jalan menuju sana sulit banyak jalan yang rusak selain itu tidak hanya dalam rapat koordinasi kecamatan saja kita kesana, dalam pengumpulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kita harus kesana lagi. Untuk tahun 2014 ini sudah enak dalam rapat koordinasi karena setiap kecamatan sudah di beri wewenang untuk melakukan koordinasi di masing-masing kecamatan selain itu dalam pengajuan RDKK kelompok tani didampingi oleh Kepala Balai Penyuluh Kecamatan serta Mantri Tani langsung di Dinas Pertanian Trenggalek.” (Wawancara pada tanggal 31 Maret 2014 di

Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Menurut hasil Laporan Pelaksanaan Program Peningkatan Beras Nasional di Trenggalek Tahun 2012 hasil temu teknis di tingkat kabupaten serta di tingkat kecamatan ada sebagai berikut:

a. Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten

Temu Teknis Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten dilaksanakan setelah melalui rapat koordinasi di tingkat Bapelluh yang dihadiri oleh Kepala BPK, penyuluh pendamping 22 unit SL-PTT dan penyuluh yang ada di kantor Bapelluh Kab. Trenggalek. Tujuan dilaksanakannya Temu Teknis adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dan menyusun rencana kegiatan SL-PTT
- 2) Menyusun matrik pengawalan dan pendampingan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi
- 3) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi

Kegiatan temu teknis tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Bapelluh dengan berkoordinasi bersama Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek, dimana pimpinan dari kedua instansi tersebut sekaligus berperan menjadi narasumber.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang terdiri dari unsur:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
- 2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
- 3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian se kabupaten Trenggalek
- 4) Mantri Tani se kabupaten Trenggalek
- 5) Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) se Kabupaten Trenggalek

6) Penyuluh Pertanian Kabupaten

Dalam kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten tersebut tercapai hasil kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi pengawalan pendampingan SL-PTT oleh POPT, mantri tani dan Penyuluh pendamping di lokasi SL – PTT.
- 2) Lokasi SL-PTT akan dijadikan sebagai bahan pengkajian jarak tanam (Prapatan 25 x 25 cm dan prapatan 40 x 20 x 10 Cm) dan 4 Varietas (Inpari 13, Inpari 7, Inpari 4 dan Inpari 10)
- 3) Lokasi pembanding diluar SL-PTT dijadikan demplot dengan perlakuan jarak tanam sesuai kondisi dilokasi. Dan selebihnya lahan yang ditanami tergantung petani.
- 4) Penyuluh pendamping diminta untuk membuat kurikulum SL-PTT berisi jadwal dan materi SL yang disusun secara lengkap mulai dari pengantar sampai penutup.
- 5) Pada masing-masing lokasi SL agar ditentukan angka produktivitas sebelum pelaksanaan SL-PTT, untuk nantinya dibandingkan dengan tingkat produktivitas sesudah SL.
- 6) Penyusunan RDKK karena telah selesai dilaksanakan, maka pertemuan tingkat desa dan kecamatan digunakan untuk mereview.
- 7) Pelaksanaan kaji terap dilaksanakan di tiga kecamatan dengan paket teknologi yaitu pembuatan pupuk organik plus dan aplikasinya di lapangan.
- 8) Temu lapang akan dilaksanakan di awal kegiatan SL, direncanakan tanggal 24 Nopember 2011 bertempat di Kecamatan Karang.
 - b. Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan

Tujuan dilaksanakannya temu teknis tingkat kecamatan adalah untuk :

- 1) Mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahan masalah
- 2) Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan semua kegiatan

Dari kegiatan temu teknis penyuluhan tingkat Kecamatan diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Dalam kegiatan SL-PTT, tugas Penyuluh pendamping :
 - a) Membuat proposal/rencana pengkajian SL
 - b) Membuat kurikulum lengkap
 - c) Membuat laporan berkala setiap pengamatan/pertemuan
 - d) Membuat laporan pelaksanaan SL-PTT
 - e) Membuat laporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian SL-PTT pada kelompok yang berisi tentang:
 - Perencanaan penyuluhan
 - Pelaksanaan penyuluhan meliputi mengumpulkan materi penyuluhan, penerapan metoda penyuluhan dan penyelenggaraan metoda penyuluhan.
- 2) Tugas Kepala BPK
 - a) Melaksanakan monev kegiatan SL-PTT
 - b) Membuat laporan berkala pelaksanaan SL-PTT
- 3) Metoda Pelaksanaan SL-PTT yang akan dilaksanakan adalah :
 - a) Varietas yang akan diuji : Inpari 4, Inpari 7, Inpari 10 dan Inpari 13
 - b) Perlakuan jarak tanam : Prapatan 25 x 25 cm² dan prapatan 40 x 20 x 10 cm²
 - c) Jumlah ulangan sebanyak 3x setiap perlakuan

- d) Parameter yang diamati : jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah gabah per malai, jumlah populasi (rumpun), hasil ubinan dan produksi.
- e) Analisa data yang digunakan adalah tabulasi data
- f) Penyimpulan data didasarkan pada hasil tabulasi dan dibandingkan dengan produksi tanaman padi ditempat uji tahun lalu dan berdasarkan produktivitas varietas berdasarkan deskripsi varietas.

Selain dari segi teknis pelaksanaan SL-PTT kegiatan yang perlu di kaji adalah bagaimana RDKK kelompok tani terbentuk. Fungsi RDKK adalah rencana kerja dari kelompok tani untuk satu musim tanam yang berisi tentang rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha taninya melalui RDKK inilah bantuan sosial dari pemerintah dirinci. Bagaimana RDKK itu disusun dan apa saja isi RDKK itu, Bapak Nur Tamam mengatakan bahwa:

“Penyusunan RDKK pada waktu itu dilakukan langsung di BPK Munjungan yang didampingi langsung oleh penyuluh lapang. Isi dari RDKK adalah rincian kebutuhan kelompok dalam satu musim tanam yang digunakan untuk SL-PTT nantinya, yang berupa: benih padi, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, konsumsi, dan ATK. Untuk bantuan pemerintah yang diberikan setiap ada program tidak tetap jumlahnya yang jelas dibawah dua juta rupiah, dana itu digunakan untuk menebus saprodi yang ada di RDKK tersebut.” (Wawancara pada tanggal 31 Maret 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Secara rinci tentang mekanisme kelompok tani penerima bantuan langsung benih unggul SL-PTT menurut Juknis (Petunjuk Teknis) SSL-PTT padi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program bantuan benih kepada Dinas Pertanian Provinsi dan melakukan PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.

2. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan benih yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani kepada mantri tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Pertanian, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih yang meliputi jumlah, varietas, jadwal tanam serta lokasi.
3. Permohonan bantuan benih kelompok tani selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh mantri tani/Kepala Cabang Dinas (KCD).
4. Permohonan yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi serta verifikasi selanjutnya oleh mantri tani/KCD dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten.
5. Rekapitulasi dan data kelompok tani dari kecamatan selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani penerima bantuan dalam bentuk keputusan. Selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
6. Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani penerima bantuan beih dari kabupaten/kota di wilayahnya, selanjutnya menyetujui dan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen.
7. PPK menyampaikan usulan dari Dinas Pertanian Provinsi tersebut kepada pelaksan PSO sebagai dasar pelaksana kerjasama.

Sedangkan untuk mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial SL-PTT menurut juknis adalah sebagai berikut:

1. Pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) SL-PTT, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, tentang tata cara pencairan belanja bantuan sosial, dan peraturan lainnya.
2. Mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) SL-PTT, dengan sumber dana APBN melalui Pos Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan kelompok tani yang akan menerima dana bantuan kegiatan SL-PTT, termasuk di dalamnya dilengkapi data nama kelompok, jumlah anggota, nama ketua kelompok, luas lahan, alamat kelompok, no rekening dan nama bank atas nama kelompok tani sasaran, jumlah bantuan yang akan diberikan, serta data lainya yang diperlukan.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja setempat, mengajukan usulan pencairan dana atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan kelompok tani penerima dana SL-PTT, melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan tentang penetapan kelompok tani penerima bantuan.
 - 2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

3) Surat pernyataan kelompok tani tentang kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.

- c. Pejabat penanda tangan SPM melakukan pengujian SPP-LS meliputi pemeriksaan rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan; ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; memeriksa hak tagih yang terkait meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran bantuan (nama penerima bantuan SL-PTT, alamat, nomor rekening dan nama bank), dan nilai bantuan yang harus dibayar.
- d. Berdasarkan hasil pengujian SPP, Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh tanpa ada pemotongan pajak.
- e. Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS kepada KPPN Kediri.

Mekanisme pengadaan BLM SL-PTT adalah sebagai berikut:

1. Dana yang telah dicairkan oleh kelompok tani dipergunakan untuk membeli saprodi sesuai dengan kebutuhan kelompok sebagai mana yang telah tertuang pada RDKK.
2. Kelompok tani dapat membeli saprodi di kios/toko saprodi terdekat atau di produsen penyalur saprodi sesuai dengan RDKK.
3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan bantuan SL-PTT, kelompok tani penerima bantuan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mencatat semua nomor seri label benih yang diterima.

- b. Mencatat semua nomor seri karung/kantung/botol/kemasan pupuk/saprodi yang dibeli.
 - c. Membuat berita acara penerimaan bantuan SL-PTT.
 - d. Menggunting salah satu nomor seri label/sertifikat benih pada setiap kantong benih pada setiap kantong benih yang dibantukan untuk dilampirkan pada berita acara penerimaan bantuan SL-PTT dan diserahkan kepada penyuluh lapangan setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - e. Saprodi yang belum digunakan agar disimpan dengan baik untuk menjaga mutu.
4. Mantri tani selaku penanggung jawab pelaksanaan SL-PTT tingkat kecamatan melaporkan kebenaran penerimaan benih dan penggunaan anggaran bantuan sosial kepada Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan selaku penanggung jawab penggunaan anggaran.

3) Penerapan

Pelaksanaan SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur diikuti oleh 25 anggota sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Trenggalek. Adapun kriteria anggota yang diikutkan adalah menurut Bapak Nur Tamam sebagai berikut:

”Kelompok Tani Singgih Makmur sendiri sudah mengikuti SL-PTT ini sebanyak lima kali. Sebenarnya saya ingin anggota kelompok yang ikut program SL-PTT itu digilir, tetapi hal itu tidak memungkinkan sehingga setiap ada kegiatan SL-PTT saya mengadakan rapat kelompok dulu untuk musyawarah siapa saja yang mempunyai waktu luang untuk mengikuti program sl. Di sini ada dua orang yang menjadi guru (PNS) sehingga selama lima kali program ini mereka tidak bisa mengikuti kegiatan SL-PTT karena kegiatan SL-PTT ini dilaksanakan pada hari aktif kerja.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2014 di Rumah Bapak Nurtamam)

Peserta yang diikutkan SL-PTT ini didasarkan atas kesanggupan mereka setelah mengadakan musyawarah kelompok. Adapun anggota yang ikut SL-PTT adalah sebagai berikut:

Tabel 13: Peserta SL-PTT dari Kelompok Tani Singgih Makmur

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NUR TAMAM	RT 21	
2	MUSLIH	RT 21	
3	SUTARMAN	RT 21	
4	ABD LATIF	RT 21	
5	MUHLISIN	RT 21	
6	MUYAKIN	RT 21	
7	BONARI	RT 21	
8	TUKIDI	RT 21	
9	KATIJO	RT 32	
10	HALIM	RT 21	
11	SARDJI	RT 21	
12	ROJI	RT 20	
13	MISLAH	RT 20	
14	BAJURI	RT 21	
15	KASNIANTO	RT 21	
16	MISWAJI	RT 30	
17	SUKARNI	RT 20	
18	JUMALI	RT 21	
19	MISWANDI	RT 21	
20	SOIB	RT 21	
21	KASIRUN	RT 21	
22	TUWANI	RT 21	
23	KASANI	RT 21	
24	SUMARNI	RT 20	
25	TUMINGAN	RT 20	

Sumber: Penyuluh Lapangan Desa Masaran

Menurut Bapak Martajuddin Nuur selaku Penyuluh Lapangan Kelompok Tani Singgih Makmur tentang apa yang diajarkan di SL adalah sebagai berikut:

”Pada kegiatan SL-PTT tahun 2012 sebenarnya saya bukan penyuluh lapangan di Kelompok Tani Singgih Makmur hal ini dikarenakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Trenggalek menghendaki penyuluh lapangan pada tahun 2012 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus pembelajaran dari SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur adalah tentang efektivitas jarak tanam prapatan ($40 \times 20 \times 10 \text{ cm}^2$) dengan jarak tanam prapatan ($25 \times 25 \text{ cm}^2$) dengan

jumlah perlubang dua biji setelah itu dalam berdiskusi saya suruh bentuk enam regu dan setiap setelah melakukan pengamatan dua minggu saya suruh tiap regu untuk mempresentasikan petak studi masing-masing regu setiap dua minggu sekali. Varietas padi yang digunakan adalah Padi Ciherang yang terkenal lama masa panennya yaitu diatas seratus hari.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Secara rinci penjabaran diatas adalah kegiatan ini menggunakan varietas Padi Ciherang, dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Varietas padi yang akan diuji produktivitasnya ditanam dengan menggunakan sistem tegel (25 cm x 25 cm) dan prapatan (40 cm x 20 cm x 10 cm). Untuk petak I , II dan III jarak tanam yang digunakan prapatan (40x20x10) dan untuk petak IV, V dan VI jarak tanam yang digunakan adalah prapatan

Informasi tehnologi yang digunakan

1. Persemaian yang digunakan persemaian kering
2. Umur bibit dipindah 25 hari
3. Jumlah bibit per lubang 2
4. Melaksanakan pemupukan berimbang

Urea : 250 kg/ha

Ponska : 300kg/ha

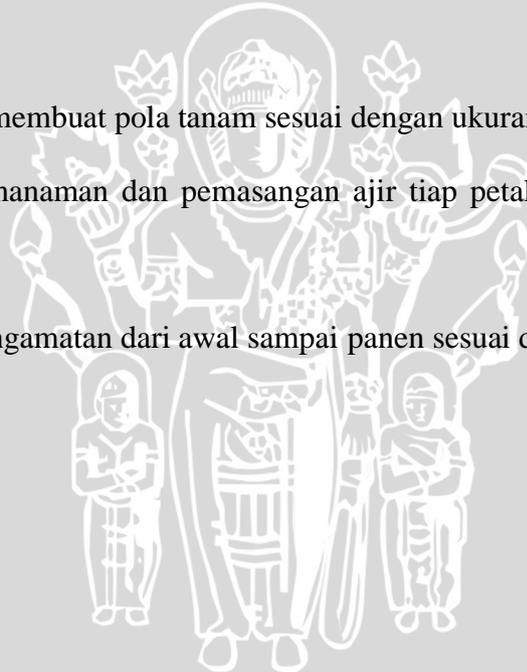
Organik : 2000kg/ha

5. Menggunakan pestisida nabati 5L/Ha

Langkah langkah kegiatan:

1. Melakukan penelusuran lahan SL-PTT petak LL untuk kegiatan belajar dan pengamatan
2. Membuat sketsa lahan SL-PTT.

3. Sosialisasi kegiatan SL-PTT dan rencana pengkajian jarak tanam terhadap produksi padi sawah dan mengadakan kontrak belajar serta membuat kurikulum dan jadwal kegiatan.
4. Membentuk enam kelompok kerja atau kelompok belajar tiap satu kelompok empat orang bertanggung jawab terhadap satu petak pengamatan, kelompok satu petak pertama kelompok dua petak dua kelompok tiga petak tiga kelompok empat petak empat kelompok lima petak lima dan kelompok enam petak enam.
5. Menyediakan ajir tiap petak tiga ajir untuk pengamatan dan dua ajir untuk jenis perlakuan
6. Menyiapkan dan membuat pola tanam sesuai dengan ukuran jarak tanam
7. Melaksanakan penanaman dan pemasangan ajir tiap petak pengamatan tiga ajir
8. Melaksanakan pengamatan dari awal sampai panen sesuai dengan kurikulum.





Tabel 14: Jadwal Kegiatan SL-PTT

No	Pertemuan Ke Tanggal	Umur Tanaman	Kegiatan dan Topik Khusus	Buku Sumber Pemandu
1	I/23-11-2011	0 HST	Sosialisasi SL- PTT dan Persiapan Awal	PHT PadiJuknis SL-PTT,PPL
2	II/30-11-2011	0 HST	Seleksi benih,pengolahan tanah,penggunaan pupuk dasar,pembatan bokasi	PHT padi Juknis SL-PTT, PPL
3	III/14-11-2011	1 HST	Jarak tanam dan penanaman	PHT Padi Juknis SL-PTT, PPL
4	IV/21-12-2011	8 HST	Pemupukan awal,pengenalan unsure hara dalam tanah, pencegahan hama dan penyakit, pengairan	PHT PadiJuknis SL-PTT, PPLPOPT
5	V/11-01-2012	33 HST	Anatomi premordia bunga,pemupukan susulan	PHT PadiJuknis SL-PTT, PPLPOPT
6	VI/29-01-2012	47 HST	Fase pembentukan polong,racun pertanian dan aspek terhadap kesehatan,penggunaan pestisida nabati	PHT PadiJuknis SL-PTT, PPLPOPT
7	VII/03 -02-2012	61 HST	Pengairan pada fase pengisian polong,pemakaian ZPT dan PPC,pemakaian pestisida yg dilarang	PHT PadiJuknis SL-PTT, PPLPOPT
8	VIII/08-03-2012	67 HST	Panen,penanganan pasca panen,penghitungan ubinan, analisa usaha tani	PHT PadiJuknis SL-PTT, PPLPOPT
9	IX/15-02-2012	75 HST	Pengairan pada fase pengisian polong Pemakaian ZPT/PPC Pestisida yang dilarang	Buku padi, Juknis PTT, PPL, POPT
10	X/19-03-2012	105 HST	Panen Penanganan pasca panen Penghitung hasil	Buku padi, Juknis PTT, PPL

Sumber: Penyuluh Lapangan Desa Masaran

Bagaimana keterlaksanaan kurikulum ajar diatas menurut Bapak Nur

Tamam adalah sebagai berikut:



”Selama proses SL-PTT para petani sebenarnya hanya disuruh untuk mengamati bagaimana perkembangan tanaman baik berupa tinggi tanaman, jumlah batang per rumpun padi, jumlah daun, banyaknya buah dan lain-lain untuk materi penyuluh mengajarkan berdasarkan keluhan yang dihadapi petani di setiap petak pengamatan masing-masing kelompok saja.” (Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2014 di Rumah Bapak Nur Tamam)

Dari hasil kegiatan SL-PTT padi Non Hibrida di Kelompok Tani Singgih Makmur dapat diambil data atau catatan dan kesimpulan yang nanti dapat digunakan untuk acuan atau perbandingan untuk tanam padi yang akan datang. Beberapa hal yang diamati dalam kegiatan ini adalah pengamatan tanaman yang meliputi jumlah batang dalam rumpun, tinggi tanaman dan jumlah daun dan pengamatan panen yang meliputi jumlah gabah per malai, gabah bernas, gabah hampa, butir hijau, jumlah rumpun dalam ubinan, jumlah anakan produktif dalam rumpun dan hasil ubinan.

Tabel 15: Data rata rata pengamatan hasil panen

NO	PENGAMATAN	TANAM PRAPATAN	TANAM PRAPATAN
1	Gabah per malai	118 buah	133 buah
2	Gabah bernas per malai	92 buah	105 buah
3	Gabah hampa per malai	11 buah	21 buah
4	Butir hijau per malai	18 buah	6 buah
5	Jumlah rumpun 1 Ha	313.600 rumpun	193.600 rumpun
6	Jumlah anakan produktif dalam rumpun	25 batang	25 batang
7	Hasil ubinan 1 Ha	12 ton	15 ton

Sumber: Penyuluh Lapangan Desa Masaran

Hasil dari data pengamatan tanaman sistem prapatan jumlah daun dan tinggi tanaman lebih banyak dan lebih tinggi sedangkan jumlah batang tanam sistem prapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem tanam prapatan.

Dari data rata rata hasil panen gabah per malai lebih banyak pada tanam sistem prapatan dan juga gabah bernas banyak pada sistem tanam prapatan disbanding dengan tanam sistem prapatan. Gabah hampa banyak pada sistem

tanam prapatan sedangkan butir hijau banyak pada sistem prapatan. Jumlah anakan produktif pada semua perlakuan hasilnya sama yaitu 25 batang tiap rumpun. Hasil ubinan dalam dua perlakuan didapat hasil yang berbeda, sistem tanam prapatan yang lebih banyak hasilnya disbanding dengan sistem tanam prapatan. Hasil ubinan dalam satu hektarnya untuk tanam prapatan 12 ton dan untuk sistem tanam prapatan 15 ton

b. Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan

1) Aspek Lingkungan

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa program SL-PTT itu sendiri adalah program pemerintah yang hasil akhir program ini dapat dihitung sukses apabila program SL-PTT ini meningkatkan produktivitas petani atau kelompok tani sasaran. Dalam prakteknya perlu adanya penyeimbang berupa teknologi unggulan PTT yaitu: varietas unggul baru; benih bermutu dan berlabel; pemberian bahan organik; pengaturan populasi tanaman secara optimum; pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman; dan pengendalian organisme tanaman terpadu (POPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Selama waktu pelaksanaan program SL-PTT, aspek lingkungan sangat diperhatikan oleh Kelompok Tani Singgih Makmur hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Heru selaku sebagai berikut:

“Kebetulan tahun 2012 saya mengawal pelaksanaan SL-PTT di Kecamatan Munjungan tepatnya Desa Masaran, Di sana pelaksanaan SL-PTT bagus walaupun yang ikut sudah usia lanjut. Yang menjadi pertanyaan apakah petani setelah SL-PTT berlangsung dapat mengambil manfaat tentang apa yang diajarkan selama kegiatan SL-PTT. Sebagai contoh untuk Petani Kecamatan Karanganyar sudah termindset bahwa sistem jarak tanam yang digunakan adalah prapatan” (Wawancara pada tanggal 15 April 2014 di Kantor Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Trenggalek)

Pernyataan Bapak Heru diatas dipertegas oleh Bapak Imam Muksin selaku Bendahara Kelompok Tani Singgih Makmur sebagai berikut:

“Pada waktu pelaksanaan SL-PTT secara keseluruhan program SL-PTT berjalan lancar jika dilihat dari penerapan teknologi serta keikutsertaan anggota. Para peserta program SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur adalah kebanyakan lanjut usia, motivasi mereka adalah dengan ikut belajar di SL-PTT usaha taninya lebih baik dari daerah lain.” (Wawancara pada tanggal 19 April 2014 di Rumah Bapak Imam Muksin)

Jadi selama kegiatan SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur itu berjalan lancar maka komponen teknologi unggulan (varietas unggul baru; benih bermutu; pemberian bahan organik; pengaturan populasi tanaman; pemupukan berimbang; dan pengendalian organisme pengganggu tanaman) serta teknologi pilihan (pengolahan tanah; penggunaan bibit muda; tanam bibit 1-3 batang per rumpun; pengairan berimbang; panen tepat waktu) telah terlaksana dengan baik berdasarkan petunjuk pertanian.

Setelah pelaksanaan SL-PTT dilihat dari aspek lingkungan, teknologi-teknologi unggulan pertanian yang berhasil diterapkan oleh petani khususnya Kelompok Tani Singgih Makmur adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nur Tamam yaitu:

“Di Desa Masaran sendiri padi yang *diblarik* (model prapatan) sudah menjadi kebiasaan sebagian besar petani tetapi untuk jumlah batang setiap rumpun tidak sebanyak 2-3 batang (sesuai anjuran pertanian) karena untuk desa masaran rawan terhadap hama *keong* (siput air) terpaksa petani minimal dua hari sekali harus menengok sawah mereka, dari penyuluh sendiri samapai sekarang belum ada kejelasan dalam penanganan siput air ini. Dari segi pemupukan kebanyakan petani masih menggunakan pupuk kimia hal ini dikarenakan anggapan masyarakat jika menggunakan pupuk organik tidak langsung ada efeknya pada musim tanam itu, pendistribusian dan pemakaian pupuk organik hanya ketika kegiatan SL-PTT sebenarnya setiap kelompok tani bisa mengusulkan pengadaan pupuk organik tetapi sampai sekarang anggota kelompok saya belum ada minat untuk mengajukan pupuk organik. Untuk penyemprotan penyuluh menghimbau menggunakan dosis yang rendah serta dilarang mencampur banyak obat jika sampai merubah reaksi kimia dari obat tersebut tetapi kenyataannya kebanyakan petani mencampur obat serta masih menggunakan dosis tinggi

dikarenakan hasil yang didapatkan hampir sama baik penyemprotan yang berkala dengan penyemprotan yang jarang tetapi menggunakan dosis tinggi. Jerami sisa panen biasanya langsung dibakar tanpa diolah kemudian dijadikan pupuk kompos” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2014 di Rumah Bapak Nur Tamam)

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa tidak banyak serapan teknologi pertanian yang diadopsi setelah SL-PTT berlalu hal ini dikarenakan kurangnya keseriusan dan kultur petani dalam mengelola sawah dan ingin mendapatkan hasil secara instan. Walaupun demikian Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan selalui mengarahkan petani untuk bercocok tani sesuai dengan anjuran dinas pertanian, seperti yang dikatakan Bapak Khairul Anam sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam setiap pertemuan kelompok dengan BPK khususnya yang berkaitan dengan SL-PTT, penyuluh serta mantri tani selalui memberikan anjuran cara bertani yang benar sesuai anjuran dinas seperti penggunaan pupuk urea 250 Kg/Ha, harus diblarik, pemupukan seimbang dan lain-lain sebelum terlaksananya SL-PTT sendiri. Khusus yang berkaitan dengan pupuk organik, petani di Kecamatan Munjungan secara umum masih sangat tergantung dengan pupuk pabrik karena alasan mereka jika tidak menggunakan pupuk pabrik *kurang marem* (kurang cocok) tapi yang jelas Saya sudah memberikan alternatif tentang pemupukan terutama penggunaan pupuk kandang di setiap pertemuan kelompok tani serta ketersediaan pupuk pabrik semakin langka” (Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Lebih lanjut lagi Bapak Khairul Anam menjelaskan tentang bagaimana penyerapan petani terhadap teknologi PTT sebagai berikut:

“Pemupukan yang dilakukan oleh petani konvensional kebanyakan masih kurang dalam takaran dan komposisi pupuk, kadang petani memupuk hanya urea dan ponska saja serta takaran yang kurang hal ini diakibatkan semakin langkanya pupuk yang beredar. Maka dari itu dengan adanya SL-PTT ini penyuluh mengajarkan bagaimana pemupukan yang sesuai takaran dan komposisi yaitu urea 250 kg/ha serta NPK 100 kg/ha sesuai dengan RDKK serta penggunaan pupuk organik sebagai penyeimbang hara. Secara mayoritas petani sudah terbiasa menggunakan benih bermutu varietas yang sering digunakan adalah ciherang, loping, IR64, dan lain-lain.” (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)



2) Aspek Sosial-Budaya

Aspek sosial merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, dan secara kolektif mencakup manusia, baik perorangan maupun kelompok, kepranataan serta interaksi yang terjadi antar komponen tersebut. Berbagai permasalahan sosial kemudian timbul menuntut berbagai kuantifikasi dan kualifikasi yang spesifik dan rumit. Masalah-masalah sosial (*social problems*) acap kali disebut susah diukur secara konkrit/kuantitatif.

Sasaran SL-PTT adalah petani yang mempunyai lahan baik sempit maupun luas, sesuai yang dikatakan Bapak Khairul Anam sebagai berikut:

“Sebenarnya awal munculnya SL-PTT ini memang tidak diketahui oleh pemanfaat/petani khususnya di Kecamatan Munjungan, tetapi kalau dilihat dari alasan munculnya SL-PTT itu dikarenakan oleh pertama, menurunnya derajat produksi pertanian; kedua, banyaknya petani yang memiliki lahan sempit terutama di Pulau Jawa; ketiga, sumber daya manusia petani yang rendah; keempat, semakin menyempitnya lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan; kelima, jumlah penduduk yang tidak terkendali.” (Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Target SL-PTT secara umum adalah menyerap sebanyak mungkin petani yang belum diikutkan dalam anggota kelompok SL-PTT agar mendapatkan sosialisasi SL-PTT itu sendiri. Proses pembentukan kelompok tani dalam kegiatan SL-PTT serta target SL-PTT terhadap petani non-SL menurut Bapak Khairul Anam adalah:

“Pemilikan untuk lahan satu hektar dalam SL-PTT bisaanya terdiri dari enam orang sehingga kelompok tani dengan lahan seluas 25 hektar itu bisa menampung sekitar 150 anggota ini minimal bisa jadi ada yang mempunyai lahan *seprolon* (sekitar 840 M²) tetapi umumnya lahan satu hektar hanya terdiri enam orang dan 150 orang ini tidak langsung dihitung masuk dalam anggota kelompok. Tidak terdaftarnya petani non-SL tersebut dikarenakan kelompok itu belum terkenal; belum memberikan sosialisasi yang jelas; kelompok hanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, atau kalau lebih hanya terdiri sekitar 20 orang; selain itu juga petani bersifat apriori terhadap kelompok karena beranggapan bahwa memeningkan kesejahteraan sendiri. Saya sebenarnya berharap bahwa petani itu masuk dalam anggota kelompok karena jika ada bantuan maka anggota kelompok



dapat menikmati bantuan tersebut.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Pengembangan kapasitas petani dalam SL-PTT menerapkan Metode belajar orang dewasa, lebih lengkap Bapak Khairul Anam menjelaskan:

“Pedoman yang saya pakai adalah mengorbankan orang, disini yang ada bukan guru dan murid tetapi pemandu. Untuk metode belajar orang dewasa ini para petani akan terhormat ketika mereka menyampaikan pengalamannya kemudian kita mencoba mendiskusikan bersama, jadi disana tidak ada salah dan benar yang ada hanya saling menyampaikan pengalamannya selama kegiatan diharapkan dengan metode belajar ini petani dapat mandiri dan efisien dalam mengelola usaha taninya.”(Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Bapak Khairul Anam mengatakan juga dalam menghidupkan dinamika kelompok serta menambah pengetahuannya sebenarnya diperlukan keikutsertaan kaum perempuan, seperti yang dipaparkannya sebagai berikut:

“Saya pernah mempraktekkan seperti di Desa Tawing dan Gemiring pada program SL-PHT saya patok kaum perempuan harus ada minimal 30%, ternyata diskusi kelompoknya berjalan dengan lancar. Kalau dihubungkan dengan dinamika pertanian sehari-hari maka fungsi kaum perempuan ternyata krusial seperti untuk proses penanaman kebanyakan adalah kaum perempuan, kebanyakan dari mereka menerapkan sistem pertanian turun-temurun sehingga dalam proses tanam mereka menerapkan satu lubang banyak biji. Dan juga dalam keluarga sebenarnya dalam kultur kita kebijakan terbesar adalah ibu sedangkan pelaksanaan di lapangan adalah bapak.” (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Respon positif anggota Kelompok Tani Singgih Makmur dengan adanya kegiatan SL-PTT ini adalah seperti yang di paparkan bapak Imam Mukhsin sebagai berikut:

“Di Kelompok Tani Singgih Makmur sendiri dengan adanya SL-PTT antusias anggota sangat tinggi terutama anggota yang sudah berusia lanjut, dengan adanya SL-PTT ini anggota mengharapkan usahataniya menjadi lebih baik dibandingkan dengan daerah lain” (Wawancara pada tanggal 4 April 2014 di Rumah Bapak Imam Mukhsin)



Jika dilihat dari segi sosial dengan adanya program SL-PTT maka ada beberapa kemudahan anggota kelompok dalam mendapatkan saprodi di setiap musim tanam, Bapak Nur Tamam memaparkan bahwa:

“Anggota inti dari Kelompok Singgih Makmu sebenarnya berjumlah 40 orang tetapi dengan adanya SL-PTT ini maka jumlah anggota bertambah mnejadi 64 orang. Sejumlah 64 inilah yang nantinya diajukan untuk penebusan pupuk dimana setiap 1 Ha dari 25 Ha lokasi SL-PTT mendapatkan 250 Kg pupuk urea setiap musim tanam dan pupuk bias didistribusikan kepada selain anggota kelompok jika keperluan pupuk di anggota sudah cukup. Untuk sistem pembeliannya dengan sistem hutang gabah dimana petani bias mengambil pupuk dengan membayar padi hasil panen mereka jika dihitung untung yang saya peroleh dari setiap kuintalnya setelah panen adalah Rp. 21.000 uang ini nanti saya kembalikan ke kelompok untuk dijadikan santunan seperti gula dan kue setiap menjelang Hari Idul Fitri” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2014 di Rumah Bapak Nur Tamam)

3) Aspek Ekonomi

Dasar dari SL-PTT adalah transfer ilmu tentang teknologi unggul pertanian dari pemerintah kepada petani. Jadi inti dari SL-PTT itu sendiri adalah pendidikan pertanian oleh pemerintah melalui penyuluh pertanian. Harapan dari adanya SL-PTT adalah diterapkannya teknologi pertanian yang unggul disertai dengan teknik pengolahan pertanian yang benar sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian.

Penghasilan padi di lahan SL-PTT dan non-SL Kecamatan Munjungan menurut Bapak Haryono selaku Kepala BPK Munjungan adalah:

“Penghasilan padi untuk diluar sl 6 ton/ha, untuk sl sendiri 7 ton/ha. Kalau musim kemarau panjang ada tanah yang tidak ditanami karena banyak sumber pendapatan selain dari sektor pertanian.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di BPK Munjungan)

Selisih penghasilan pertanian yang tidak terlalu jauh antara sawah area SL dengan Non SL dikarenakan keduanya sama-sama menggunakan inisiatif sendiri dalam menggunakan teknologi maupun teknik pengolahan. Hanya saja bagi petani





di kawasan SL yang sudah tergabung dalam kelompok tani mendapatkan bantuan benih unggul sama seperti yang diterapkan di Demplot.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Qomarudin Selaku petani yang menerapkan teknik pertanian yang konvensional:

“Sebenarnya untuk penghasilan sawah seluas $\frac{1}{4}$ *bahu* (sekitar seperenam hektar) paling baik diperoleh penghasilan 1 ton tetapi normalnya hanya 800 kuintal gabah basah. Sedangkan untuk merawat tanah $\frac{1}{4}$ *bahu* itu diperlukan dana sebesar Rp 1.427.500 yang terdiri dari 140 rb untuk tanam, 200 rb untuk bajak, 200rb untuk mencangkul dan daut (membersihkan gulma/tanaman parasit), 222,5 rb untuk pupuk, 100rb untuk obat, 500rb untuk panen, dan 75 rb keperluan lain-lain” (Wawancara pada tanggal 9 April 2014 di Rumah Bapak Qomarudin)

Dari segi ekonomi perbedaan pendapatan antara petani yang ikut SL-PTT dengan Non-SL penghasilannya tidak terlalu jauh hal ini dikarenakan operasional di sektor pertanian untuk Kecamatan Munjungan sendiri mahal, Bapak Nur Tamam mengatakan bahwa:

“Untuk kehidupan petani desa seperti saya dengan penghasilan pas-pasan itu merasa senang jika sudah ada beras tanpa beli dengan memanfaatkan sawah sendiri. Sayangnya untuk upah buruh tani di sini sangat mahal sebagai contoh untuk tanam per-ikat benih padi saya membayar Rp 2.500 dan untuk total lahan saya saya mengeluarkan Rp. 75.000 perorang berbeda dengan di kota trenggalek yang dipatok Rp 30.000 untuk upah tanam, harga obat yang mahal, penebusan pupuk di kelompok tani, serta upah mencangkul Rp. 50.000 jika diitung *full time* dan bajak sawah lebih dari lima ratus ribu. Dari segi penghasilan sawah saya yang setengah hektar itu menghasilkan 75 karung atau sekitar tiga ton sekali panen jika dibilang untung ya masih ada untung dengan harga padi kering Rp 4.500. total biaya operasional belum termasuk pupuk dan obat sekitar dua juta setengah.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2014 di Rumah Bapak Nur Tamam)

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu menuju pembangunan berkelanjutan:

Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan tanaman terpadu di Kecamatan Munjungan menurut Bapak Khairul Anam sebagai Berikut:



“Secara umum kendala SL-PTT adalah dana yang sangat minim, kalau kita menggunakan analisis SWOT diperoleh keperpihan desa/kecamatan sangat minim dengan adanya program, petani yang heterogen atau patrenalis dengan menggunakan metode tertentu sangat lamban dan pasif dalam menerepkan inovasi SL-PTT hal ini dikarenakan naluri tanam turun-temurun serta tingkat pendidikan yang rendah, serta program masuk ke Munjungan itu menjadi *problem* karena masyarakat sangat apriori terhadap proyek pemerintah bupaten terutama berkaitan dengan jalan umum. Sedangkan untuk peluang-peluang dari pertanian di Kecamatan Munjungan yaitu: potensi wilayah sangat memungkinkan untuk dikembangkan menuju wilayah agrobisnis dan agroindustri; produk-produk Munjungan bahkan kalau dulu melimpah sekarang melimpah ruah seperti pisang, ketela, cengkeh sedangkan proses produksinya tidak di Munjungan padahal menyerap banyak tenaga kerja lebih banyak; pangsa pasar mendukung jika jalur lintas selatan sudah terlaksana; serta kebanyakan masyarakat Munjungan mempunyai mata pencaharian ganda, petani, pelaut, ternak, petani ladang.”
(Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Balai Penyuluhan Kecamatan Munjungan)

Dari penjabaran Bapak Khairul anam diatas dapat dimasukkan kedalam poin-poin berikut:

Penghambat:

- a. Kebanyakan petani berpendidikan rendah.
- b. Dana untuk SL-PTT sebagian besar hanya digunakan untuk penebusan saprodi.
- c. Kepedulian perangkat birokrasi desa dan kecamatan sangat minim.
- d. Petani yang patrenalis sangat sulit menerima teknologi.
- e. Ketidakpedulian masyarakat terhadap program-program pemerintah.
- f. Topographi daerah yang buruk yang menimbulkan biaya transport tinggi.

Pendukung:

- a. Potensi wilayah sangat memungkinkan untuk dikembangkan menuju wilayah agrobisnis dan agroindustri.

- b. Produk-produk Munjungan melimpah ruah seperti pisang, ketela, dan cengkeh tetapi produksinya tidak disini, padahal dalam proses produksinya menyerap banyak tenaga kerja lebih banyak.
- c. Pangsa pasar mendukung jika jalur lintas selatan sudah terealisasi.
- d. Mata pencaharian petani tidak hanya di sektor pertanian sawah tetapi juga di sektor perikanan, perkebunan, dan ladang.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan, maka peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada, peneliti menggunakan metode kualitatif dimana metode ini ditujukan untuk melukiskan atau menggambarkan bagaimana hasil dari pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu di kelompok tani singgih makmur menuju pembangunan berkelanjutan. Berikut ini secara berturut-turut analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud:

1. Pengoperasian Program Pengelolaan Tanaman Terpadu pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran

a. Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan lembaga pemerintah yang menangani SL-PTT di tingkat kabupaten sampai tingkat desa ada dua versi yaitu pertama, Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007. Kedua, Petunjuk Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan



Perkebunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 ini maka lembaga yang menangani program SL-PTT di tingkat kabupaten ada tiga kelembagaan yaitu: tingkat kabupaten adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek sedangkan untuk operasional pelaksana SL-PTT adalah Sub Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek di bidang produksi tanaman pangan; tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Kantor Kecamatan; tingkat desa pada kantor desa/kelurahan. Sedangkan menurut Petunjuk Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 untuk lembaga pelaksana SL-PTT dari tingkat kabupaten sampai desa adalah sebagai berikut: tingkat kabupaten adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek sedangkan untuk operasional pelaksana SL-PTT adalah Sub Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek di bidang produksi tanaman pangan; penanggung jawab di tingkat Kecamatan Munjungan adalah mantri pertanian sedangkan penanggung jawab teknis adalah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat; dan di tingkat desa/unit SL-PTT adalah pemandu lapangan/penyuluh pertanian dibantu oleh dibantu oleh POPT dan Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman (PBT) tingkat kecamatan/desa.

Pengelolaan kelembagaan SL-PTT ini telah sesuai dengan kajian yang dipaparkan oleh Charles O. Jones (1991:35) yang menyebutkan bahwa





organisasi/instansi pelaksana adalah organisasi/instansi yang harus memiliki struktur organisasi, memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Kekurangan dari sisi organisasi yang menangani SL-PTT adalah peran pemerintah desa serta kecamatan sangat minim tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/406.012/2007. Seluruh pelaksanaan dibebankan kepada Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan, mantri pertanian, dan penyuluh lapangan masing-masing desa. Dengan banyaknya tugas dan wewenang yang dibebankan kepada balai penyuluh kecamatan, mantri tani, dan penyuluh lapangan maka dilihat dari segi perencanaan SL-PTT hampir semuanya tidak sepenuhnya mengikuti pedoman pelaksanaan SL-PTT, pada umumnya seluruh kelompok tani di Kecamatan Munjungan tinggal menerima paket teknologi muatan SL-PTT, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Disisi lain untuk meningkatkan kompetensi teknis dari penyuluh lapangan pelatihan hanya dilaksanakan ketika ada pendampingan dari dinas pertanian saja. Hal ini disebabkan anggaran yang digunakan untuk operasional SL-PTT sangat minim dan kebanyakan alokasi anggaran tersebut hanya digunakan untuk penebusan saprodi yang nantinya digunakan dalam praktek lapang masing-masing kelompok tani.





b. Interpretasi

Pelaksanaan SL-PTT tahun 2012 jika dilihat dari kesiapan teknis maupun administratif berjalan lancar. Pelaksanaan yang bersifat administratif di tingkat kecamatan secara keseluruhan dipegang oleh mantri tani sebagai kepanjangan tangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek di kecamatan. Tugas dan wewenang mantri di bidang administratif adalah sebagai penentu pengajuan bansos yang selanjutnya diajukan ke dinas pertanian; mengkoordinir dan membantu penyusunan RDKK tingkat kecamatan; serta pemantau penyaluran saprodi yang diterima kelompok tani penerima bansos di tingkat kecamatan. Selain itu juga telah terbentuknya calon lokasi dan calon petani pada tahun 2008 mempermudah mantri maupun penyuluh dalam pelaksanaan tahap-tahap teknis maupun administratif dari SL-PTT sendiri.

Dari segi pelaksanaan yang bersifat teknis telah dilaksanakannya temu teknis tingkat kabupaten maupun kecamatan. Tetapi temu teknis ini hanya berlangsung jika ada pendampingan dari dinas saja normalnya memang tidak ada temu teknis tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penyebab ketidak adanya temu teknis ini dikarenakan Bapelluh tidak mempunyai cukup anggaran untuk menyelenggarakan temu teknis. Dari pelaksanaan temu teknis ini didapatkan hasil kesepakatan yang nantinya akan diterapkan dalam praktek lapang setiap lokasi SL-PTT seperti: dijadikannya lokasi LL sebagai pengkajian jarak tanam (prapatan 25 x 25 cm dan jajar legowo 40 x 20 x 10 cm) varietas yang digunakan (Inpari 13, Inpari 7, Inpari 4 dan Inpari 10), penyuluh pendamping membuat kurikulum SL-PTT yang berisi jadwal dan materi SL, pembuatan ubinan sebelum dan sesudah SL-PTT.



Telah dirancangnya kegiatan baik teknis maupun administratif untuk mengawali SL-PTT tersebut sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Charles O. Jones (1991:35) Maksud interpretasi adalah agar implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Sesuai dengan peraturan, berarti setiap pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana, berarti pelaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.
- c. Sesuai dengan petunjuk teknis, berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

Dari segi interpretasi program ini yang menjadi kendala besar adalah minimnya anggaran dalam operasional SL-PTT sendiri terutama di bidang teknis sehingga metode yang akan diterapkan untuk praktek lapang setelah SL-PTT tahun 2012 berdasarkan pada temu teknis tahun 2012 saja dan jadwal pertemuan disesuaikan dengan RDKK masing-masing kelompok tani.

c. Penerapan

Untuk mengawali pelaksanaan praktek SL-PTT, Kelompok Tani Singgih Makmur mengadakan pertemuan kelompok tani dalam penentuan anggota yang akan diikuti praktek lapang SL-PTT dari pertemuan ini diperoleh 25 anggota yang mempunyai waktu luang mengikuti praktek lapang. Penentuan jadwal pertemuan praktek merupakan hasil musyawarah bersama antara Kelompok Tani Singgih Makmur dengan penyuluh lapang, dari musyawarah ini keputusan yang dihasilkan adalah praktek lapang diadakan adalah setiap hari rabu, pertemuan rutin setiap dua minggu sekali, dibentuk enam petak pengamatan sehingga 25 anggota ini dibagi menjadi enam kelompok lagi untuk mengamati setiap petaknya, sasaran pembelajaran adalah tentang penerapan jarak tanam menggunakan metode jajar legowo ($40 \times 20 \times 10 \text{ cm}^2$) dan prapatan ($25 \times 25 \text{ cm}^2$).

Selama praktek berlangsung enam kelompok tersebut harus mengamati pertumbuhan padi antara lain: jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah gabah per malai, jumlah populasi (rumpun), hasil ubinan dan produksi. Pertemuan selama masa tanam dilaksanakan sebanyak delapan kali, setiap pertemuan setiap kelompok harus mempresentasikan tentang pertumbuhan padi di masing-masing petak. Secara keseluruhan jika dilihat dari terlaksananya program SL-PTT maka disimpulkan bahwa SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur dilaksanakan secara lancar.

Menurut Charles O. Jones (1991:35) Maksud penerapan/aplikasi yaitu peraturan kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan dimana untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta

jadwal kegiatan disiplin. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Program kerja yang sudah ada memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara inti kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- b. Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c. Jadwal kegiatan disiplin berarti program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhirinya agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hal yang kurang diperhatikan petugas lapang adalah berkaitan dengan kurikulum setiap pertemuan. Dari penelitian ini didapatkan bahwa petani hanya melakukan pengamatan terhadap rumpun masing-masing kelompok tanpa dibarengi dengan materi berdasarkan kurikulum pertemuan.

2. Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan

a. Aspek Lingkungan

Demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dilihat dari aspek Lingkungan program SL-PTT ini pemerhatian faktor lingkungan dijadikan salah satu unggulan selain tujuan SL-PTT itu sendiri melalui penerapan teknologi PTT. Berdasarkan bobot teknologi PTT yang akan diterapkan teknologi pertanian PTT adalah sebagai berikut (1) penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi atau bernilai ekonomi tinggi, (2) penggunaan benih bersertifikat dengan mutu bibit

tinggi,(3) penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi, (4) penggunaan kompos atau bahan organik, (5) pengelolaan bibit dan tanaman padi sehat melalui pengaturan tanam dengan memperhatikan populasi minimum, seleksi/perlakuan benih, penanaman bibit umur muda dengan jumlah terbatas (1 -3 bibit per lubang), pengaturan pengairan, dan pengendalian gulma.(6) pengendalian organism pengganggu dengan pendekatan terpadu, (7) penanganan panen yang baik untuk menekan resiko kehilangan hasil (Balitbangtan, 2007).

Penerapan teknologi PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur ini keseluruhannya dapat dilaksanakan secara maksimal ketika ada praktek lapangan saja hal ini dikarenakan selain petani mendapatkan bansos juga petani secara intensif didampingi oleh petugas lapang. Tetapi setelah praktek lapangan berlangsung dari hasil pengamatan diperoleh bahwa dengan adanya SL-PTT berdampak positif terhadap anjuran-anjuran dinas pertanian tentang cara bercocok tanam yang baik walaupun tidak semua teknologi dapat diserap dengan baik. Teknologi pertanian yang secara umum diterapkan oleh petani adalah pengaturan jarak tanam (prapatan) serta penggunaan bibit berlabel secara mayoritas sudah diterapkan petani di Kecamatan Munjungan. Dalam penerapan di Anggota Kelompok Tani Singgih Makmur sendiri sebenarnya pengaturan jarak tanam tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada anjuran dinas yang berupa setiap lubang 2-3 benih padi dikarenakan banyaknya hama siput air yang sampai saat ini belum jelas tentang cara penanganannya dan petanipun terpaksa mengambil satu persatu siput air tersebut dari sawahnya. Berkaitan dengan kesadaran petani tentang pentingnya pupuk organik/kandang masih kurang hal ini disebabkan petani lebih memilih pupuk buatan dikarenakan hasil pemupukan dapat langsung dilihat pada



musim itu juga, ketidaksadaran petani ini dapat dilihat dari tidak adanya pengajuan pengadaan pupuk organik di setiap musim tanam.

b. Aspek Sosial-Budaya

Sasaran dari SL-PTT itu sendiri adalah petani yang mempunyai lahan sawah dan tergabung dalam kelompok tani. Lahan yang dikelola kelompok tani adalah 25 hektar untuk sawah padi inbrida dan normalnya di Kecamatan Munjungan dalam 1 hektar kepemilikan lahan ada enam orang ada juga yang 1 hektar terdiri dari 12 orang tetapi dengan luasan hamparan 25 hektar ini tidak seluruh petani yang mempunyai lahan dihamparan tersebut terdaftar sebagai anggota kelompok, keanggotaan kelompok didasarkan atas keinginan petani secara individu untuk mendaftarkan dirinya sesuai dengan plotting hamparan. Target SL-PTT jika dihubungkan dengan kelompok tani adalah menyerap sebanyak-banyaknya petani untuk bergabung dengan kelompok tani, target ini didasari alasan bahwa semakin banyak petani yang bergabung maka semakin cepat perputaran keikutsertaan praktek lapang yang terdiri dari 25 anggota setiap prakteknya.

Selama praktek lapangan SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur berlangsung keikutsertaan kaum wanita sangat minim padahal keikutsertaan kaum perempuan sangat dibutuhkan hal ini disebabkan kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga wanita berperan sebagai pengambil kebijakan terbesar sedangkan untuk pelaksanaan terbesar berada di pihak laki-laki.

Dampak positif aspek sosial dari adanya SL-PTT di Kelompok Tani Singgih Makmur yaitu memudahkan akses pengajuan pupuk buatan dari dinas pertanian perhektar dari 25 hektar dapat mengajukan pupuk urea 250 Kg

penjualan pupuk ini memang diutamakan untuk anggota kelompok, jika kebutuhan pupuk anggota kelompok terpenuhi baru dijual ke petani lain dan cara pembelian pupuk tidak menggunakan uang tetapi dengan tukar gabah hasil panen. Selain dengan adanya program-program pertanian Kelompok Tani Singgih Makmur mensejahterakan anggotanya melalui laba dari penjualan saprodi disetiap musim panen dengan membagikan kue dan gula di setiap malam hari raya idul fitri di setiap tahunnya.

c. Aspek Ekonomi

Pertanian di Kecamatan Munjungan secara keseluruhan sangat terbebani dengan mahalnya biaya input produksi seperti buruh tani, pupuk yang langka, serta obat hama yang mahal, faktor produksi lain sangat tergantung dengan alam seperti ketersediaan air selama musim tanam. Dari beberapa input produksi tersebut yang sangat diprihatinkan adalah semakin mengurangnya jumlah buruh tani terutama ketika musim cengkeh.

Dari segi pendapatan antara sawah dan kebun pendapatan yang dihasilkan seimbang. Sehingga untuk menopang hidupnya para petani terutama bagi mereka yang tidak PNS mengandalkan dari hasil keduanya. Untuk anggota Kelompok Tani Singgih Makmur sendiri tidak ada anggotanya yang mengandalkan sektor sawah untuk menopang penghasilan sehari-hari.

Dengan adanya SL-PTT ini pendapatan petani meningkat jika dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti program SL-PTT yaitu: Untuk petani non SL produktivitas pertaniannya untuk seperenam Ha normalnya adalah 800 kuintal sedangkan untuk petani yang mengikuti SL-PTT adalah 3 ton untuk setengah hektarnya. Dari sini dapat dilihat selisih produktivitas padi untuk petani



SL-PTT dan non-SL untuk setiap setengah hektarnya berturut-turut adalah 3 ton dan 2,4 ton gabah kering giling. Jika dilihat operasional biaya yang dikeluarkan maka biaya yang paling banyak dikeluarkan petani adalah untuk membayar buruh tani. Tetapi dengan adanya SL-PTT ini petani dapat merekayasa bagaimana lahan pertaniannya dapat memberikan hasil maksimal.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu menuju pembangunan berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur dilihat dari segi operasionalisasi program adalah sebagai berikut:
 - a. Dari segi organisasi peserta SL-PTT terkoordinir berjalan dengan baik. Tidak adanya peran Pemerintah Desa Masaran dan Pemerintah Kecamatan Munjungan mengakibatkan banyak tahapan dalam SL-PTT dilewati seperti pemahaman masalah dan peluang sehingga dalam pelaksanaannya petani peserta hanya menerima paket teknologi yang telah disusun oleh pelaksana program saja serta dikarenakan minimnya anggaran untuk program sendiri maka pelatihan petugas lapang hanya dilaksanakan ketika ada pendampingan dari dinas saja.
 - b. Dari segi interpretasi sudah berjalan dengan baik baik berupa penjabaran petunjuk teknis dari segi administratif yang dilakukan oleh mantri tani sedangkan dari segi teknis, pelaksanaan temu teknis hanya dilakukan ketika ada pendampingan saja.
 - c. Dari segi pelaksanaan, penyuluh lapang telah memiliki prosedur kerja yang terprogram yaitu berupa kurikulum, waktu pertemuan yang ditentukan sesuai musyawarah dengan petani peserta, serta sasaran yang akan dicapai dengan praktek SL-PTT ini. Tetapi dalam



pelaksanaanya petugas lapang hanya terpacu pada sasaran yang akan dicapai tanpa memperhatikan kurikulum yang ada.

2. Indikator Program Pengelolaan Tanaman Terpadu menuju pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga aspek, indikator ini digunakan untuk melihat perubahan sikap petani selama adanya program SL-PTT. Adapun indikator itu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari aspek lingkungan, penyerapan teknologi pertanian oleh petani peserta kurang maksimal dikarenakan masih banyak petani yang menggunakan cara tanam patrenalistis serta belum sadarnya petani tentang pemupukan berimbang.
- b. Dilihat dari aspek sosial, dengan adanya SL-PTT dapat memudahkan Kelompok Tani Singgih Makmur untuk mengajukan permintaan pupuk bagi anggotanya serta berfungsinya kelompok tani sebagai penyalur saprodi dapat lebih mensejahterakan anggota dengan adanya santunan setiap tahunnya.
- c. Dari segi ekonomi, secara umum kultur masyarakat Kecamatan Munjungan pada umumnya memang tidak terlalu mengandalkan sektor pertanian sebagai penghasil ekonomi tunggal hal ini dikarenakan penghasilan dari sektor bumi lain juga hampir sama dengan penghasilan sektor pertanian. Dampak positif dari adanya SL-PTT adalah meningkatnya pendapatan petani SL jika dibandingkan dengan petani non-SL.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Untuk lembaga yang mengurus program SL-PTT khususnya BPK dan mantri tani hendaknya juga memperhatikan bagaimana petani peserta itu beradaptasi dengan teknologi unggul pertanian setelah SL-PTT berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pemahaman peluang dan masalah bersamaan dengan penyusunan RDKK untuk mereview kembali hasil SL-PTT yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan adanya pemahaman masalah dan peluang petani lebih berinisiatif tentang bagaimana cara tanam yang cocok untuk sawah mereka masing-masing.
2. Untuk Kelompok Tani Singgih Makmur diharapkan menambahkan anggota kelompok dengan kriteria anggota baru tersebut sebagian besar mata pencahariannya bergantung dari hasil bumi, serta menambah/mengikutsertakan kaum perempuan dalam pelaksanaan SL-PTT.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Zainal, S. Purnomo, D.P. Saraswati. 2010. *Pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) Padi di Jawa Timur*. BPTP Jatim

Caiden, Gerarld E. 1982. *public administration, 2nd Ed.* California: palisades publisher

Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Penerjemah Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali

Miles, Mathew & Michael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mosher. 1995, *Pertanian (Agrikultur) Cetakan Kelima*. Jakarta: Bina Aksara

Muchdarsyah, Sinungan. 2003. *Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara

Petunjuk Teknis SL-PTT Padi dan Jagung 2013

Salikin, Karwan A. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius

Siagian. P Sondang. 1990. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Soeharjo dan Potang. 1994. *Ekonomi Pertanian Indonesia*. Bandung: Angkasa

Soekartawi. 1996. *Manajemen Usahatani*. Jakarta Universitas Indonesia Press

Suparta. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryono, Agus. 2001. *Teori Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES





WCED. 1987. *Our Common Future (The Brundlandt Report)*. Oxford: Oxford University Press

Zauhar, Soesilo.1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP MALANG

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/290/406.012/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek





repository:

LAMPIRAN
DOKUMENTASI GAMBAR HASIL PENELITIAN



Balai Penyuluh Kecamatan Munjungan



Temu Teknis Pentuluh Tingkat Kabupaten Tahun 2012





repository:



Paling Kanan Bawah: Muh. Martajuddin Nuur beserta Anggota Kelompok Tani Singgih Makmur Melakukan Pengamatan pada Petak Metode Tanam Jajar Legowo



Penakaran Pestisida Dipandu Oleh Penyuluh Lapangan





repository:



Pemerintah Kabupaten Trenggalek
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
 TRENGGALEK Kode Pos. 66316

Trenggalek, 21 Maret 2014

Kepada :
 Yth. Sdr. 1. Kepala Disperhutbun Kab. Trenggalek;
 2. Camat Munjungan
 di
TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG/PRAKERIN
 Nomor : 072/341 /406.043/2014

- MEMBACA : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Nomor : 3658/UN.10.3/PG/2014 tanggal 10 Maret 2014
- NAMA PENANGGUNG JAWAB : Dr. CHOIRUL SALEH, M.Si
- TEMA/ACARA SURVEY/KKN/ PPL/PSG : Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Kelompok Tani di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)
- TUJUAN : Penelitian guna penyusunan Skripsi
- LAMANYA SURVEY/KKN/KKL/ PPL/PSG : 24 Maret s/d 25 April 2014
- TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dan Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek
- PENGKUT/PESERTA SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG : MAHMUD SUYUTI DAHLAN
- ALAMAT : RT. 001/ RW. 001 Ds.Karangturi Kec. Munjungan Kab.Trenggalek
- LAIN-LAIN :
 1. Wajib mentaati segala peraturan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan.
 2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana/ proposal yang telah diajukan.
 3. Selesai melakukan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek.
 4. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

a. n. KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS
 KABUPATEN TRENGGALEK
 Kasubbag. Tata Usaha

ISLAMIATI, S. Ses
 Penata
 NIP. 19580406 198612 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada :
 Yth. 1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya;
 2. Sdr. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





BUPATI TRENGGALEK

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/239 /406.012/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar dan keberhasilan Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Trenggalek, perlu membentuk Tim Pelaksana Gerakan peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;





9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003, tentang pembentukan susunan Organisasi sebagai unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa dengan susunann anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. POSKO III (Tingkat Kabupaten)
Posko III berada pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Bidang Tanaman Pangan dan mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengatur kerjasama dan mengintegrasikan serta mensinkronisasi seluruh administrasi Gerakan P2BN di tingkat Kabupaten;
 - b. Menyiapkan bahan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan gerakan peningkatan produksi beras secara terkoordinasi dan terpadu;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas yang terkait dengan ketersediaan lahan, penerapan teknologi, dampak iklim, infrastruktur pertanian, sarana produksi, akses permodalan petani, pengelolaan stok beras, kelembagaan pertanian, dan kegiatan lain gerakan peningkatan produksi beras;
 - d. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi sasaran dan realisasi tanam dan panen, prasarana dan sarana produksi, dukungan permodalan, dukungan pasca panen serta pemasaran dan pengolahan hasil;
 - e. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan memberikan saran penyelesaian masalah;
 - f. Menyusun pedoman pelaksanaan gerakan peningkatan beras Nasional di tingkat Kabupaten ;
 - g. Menyusun bahan arahan untuk Tim Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka peningkatan produksi beras Nasional;
 - h. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras Nasional di tingkat Kabupaten secara berkala;
 - i. Melakukan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan produksi beras;





2. POSKO IV (Tingkat Kecamatan)

Posko IV berada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Kantor Kecamatan dan mempunyai tugas wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut ;

 - a. Mensinkronkan kegiatan P2BN di tingkat Kecamatan;
 - b. Mengkompilas: CP/CL P2BN
 - c. Mengkompilasi hasil pencatatan realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas (Ubinan), produksi, penggunaan pupuk serta penggunaan benih di tingkat desa;
 - d. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan memberikan saran penyelesaian masalah;
 - e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras Nasional di tingkat Kecamatan secara berkala;
3. POSKO V (Tingkat Kelurahan/Desa)

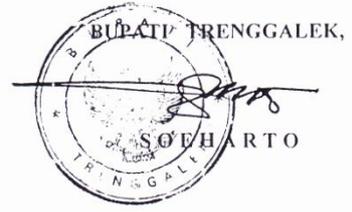
Posko V berada pada Kantor Desa/Kelurahan dan mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut :

 - a. Melaksanakan kegiatan P2BN di tingkat Kelurahan/Desa
 - b. Menginventarisir CP/CL P2BN
 - c. Mengkoordinir dan membantu penyusunan RUK dan RDKK;
 - d. Melakukan pencatatan realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi serta penggunaan pupuk dan penggunaan benih;
 - e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi beras nasional di tingkat Kelurahan/Desa secara berkala;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Satker Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Trenggalek
 Pada Tanggal : 16 Juli 2007





DATA DASAR KELOMPOK TANI

- 1. Nama Kelompok : SINGGIAH MAKMUR
- 2. Berdiri : 3 AGUSTUS 2007
- 3. No. Registrasi : 411-61/03.020.005.066/406.087/2009
- 4. Alamat sekretariat : RT. 21 RW. 24 Singgihan.
- 5. Jumlah anggota : Laki-laki : 54 orang (daftar anggota terlampir)
Perempuan : 10 orang
Jumlah : 64 orang
- 6. Pengurus :
 - Ketua I : MURTAMAM MD-HP.0852 334419 29
 - Ketua II : _____
 - Sekretaris I : IMAM MUKSIN
 - Sekretaris II : _____
 - Bendahara I : KUTAR MAN.
 - Bendahara II : _____
- 7. Luas lahan :
 - Sawah : 37.902
 - Tegal : 39.851
 - Pekarangan : 20.240
 - Hutan : 63
 - Jumlah : 151.001
- 8. Jadwal pertemuan rutin : Tiap 70L 9
- 9. Jenis kegiatan kelompok : Psudidaya Tan. pangan dan Saprodi



Penyuluh Wilbin

Suparaji





KELOMPOK TANI SINGGIH MAKMUR

DESA : MASARAN RT. 21 RW 04
KECAMATAN : MUNJUNGAN
KABUPATEN : TRENGGALEK

NO.	NAMA PETANI	ALAMAT	L/P	UMUR	KETERANGAN
1	MUSLIH	RT. 21/04	L	45	
2	MISWANDI	RT. 21/04	L	48	
3	SUDIRNO	RT. 21/04	L	49	
4	TUTIK MIHARNI	RT. 21/04	P	30	
5	ABD. MUTHOLIB	RT. 21/04	L	47	
6	ABDUL LATIF	RT. 21/04	L	50	
7	MISDI	RT. 20/04	L	56	
8	IMAM MUDAWAM	RT. 21/04	L	44	
9	JUMIYAT	RT. 21/04	L	43	
10	SITI ROBI'ATUN	RT. 21/04	P	42	
11	MUTHOLIB	RT. 20/04	L	49	
12	MUHLISIN	RT. 21/04	L	47	
13	IMAM MASYHUDIN	RT. 19/04	L	43	
14	KALIM	RT. 21/04	L	57	
15	SUWITO	RT. 21/04	L	45	
16	MISLAH	RT. 20/04	P	52	
17	BUKILAH	RT. 21/04	P	50	
18	TUKIRAN	RT. 21/04	L	58	
19	MISTIYAH	RT. 21/04	P	49	
20	JUMALI	RT. 21/04	L	50	
21	SADIKUN	RT. 21/04	L	53	
22	BONANDI	RT. 21/04	L	47	
23	SOIB	RT. 21/04	L	46	





repository:

NO.	NAMA PETANI	ALAMAT	L/P	UMUR	KETERANGAN
24	MUHTADI	RT. 21/04	L	36	
25	TUKIMUN	RT. 21/04	L	83	
26	IMAM MUHSIN	RT. 21/04	L	38	Sekretaris Poktan
27	BONARI	RT. 21/04	L	55	
28	KATMIATUN	RT. 21/04	P	54	
29	KASIRUN	RT. 21/04	L	81	
30	SUMARNI	RT. 20/04	L	58	
31	MUBIN	RT. 21/04	L	42	
32	SAMUNAH	RT. 20/04	P	52	
33	SUTARJI	RT. 19/04	L	49	
34	SARDJI	RT. 21/04	L	63	
35	SUKARNI	RT. 19/04	L	60	
36	ROHMAT	RT. 19/04	L	65	
37	SUTARMAN	RT. 21/04	L	50	Bendahara Poktan
38	JUMIYAT	RT. 21/04	L	44	
39	TUKIDI	RT. 20/04	L	55	
40	IM. NAWAWI	RT. 19/04	L	42	
41	RUKIYAH	RT. 21/04	P	52	
42	SARIPAH	RT. 21/04	P	46	
43	SALIKI	RT. 19/04	L	48	
44	MUYAKIN	RT. 21/04	L	45	
45	KATMI	RT. 21/04	P	67	
46	NUR TAMAM	RT. 21/04	L	37	Ketua Poktan
47	SUNYOTO	RT. 21/04	L	40	
48	MUKAMI	RT. 21/04	L	45	
49	BONANDI	RT. 21/04	L	48	





repository:

NO.	NAMA PETANI	ALAMAT	L/P	UMUR	KETERANGAN
50	JUWADI	RT. 21/04	L	48	
51	KASMIN	RT. 21/04	L	55	
52	SARBINI	RT. 21/04	L	54	
53	SUWADI	RT. 21/04	L	53	
54	TUWANI	RT. 21/04	L	45	
55	LADIYO	RT. 20/04	L	53	
56	KODIRUN	RT. 19/04	L	73	
57	SARNI	RT. 19/04	L	57	
58	WARSI	RT. 20/04	L	66	
59	JAYAT	RT. 21/04	L	54	
60.	SAKINAH	RT. 21/04	P	67	
61	RIBROTO	RT. 21/04	L	38	
62	SUDARJI	RT. 21/04	L	57	
63	ROJI	RT. 21/04	L	80	
64	TUMINGAN	RT. 20/04	L	51	

Masaran, 23 Desember 2013
 Ketua Kelompok Tani Singgih Makmur

(NUR TAMAM)





repository:

PROFIL DESA/KELURAHAN TAHUN 2013



DAFTAR ISI POTENSI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN	: MASARAN
KECAMATAN	: MUNJUNGAN
KABUPATEN	: TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA**





repository:

Tamatan SLB D (Tuna Rungu wicara)	-	Orang	7	Orang
Tamatan SLB C (Tuna Grahita/Mental)	-	Orang	-	Orang
Tamatan SLB D (Tuna Daksa/Fisik)	-	Orang	-	Orang
Tamatan SLB E (Tuna Laras/Anak Nakal)	-	Orang	-	Orang
Tamatan SLB G (Tuna Ganda)	-	Orang	-	Orang
Jumlah Jenjang Pendidikan Formal	1.236	Orang	1.082	Orang

D.2. Pendidikan Informal

Uraian	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Nursus	-	Orang
usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	-	Orang
usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	Orang
usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	-	Orang
usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/ Buta Aksara	-	Orang
usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	-	Orang
Tamat SD/ sederajat	-	Orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	-	Orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	-	Orang
Tamat SMP/ sederajat	-	Orang
Tamat SMA/ sederajat	-	Orang
Jumlah Jenjang Pendidikan Informal	-	Orang

E. MATA PENCAHARIAN POKOK

Mata Pencaharian Pokok

Uraian	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Petani	2.100	418
Buruh tani	700	217
Buruh migran perempuan	-	111
Buruh migran laki-laki	73	-
Pegawai negeri sipil	56	40
Pengrajin industri rumah tangga	57	31
Pedagang keliling	4	6
Peternak	361	113
Melayan	225	-
Montir	11	-
Dokter swasta	-	-
Bidan swasta	-	1
Perawat swasta	4	6
Pembantu rumah tangga	-	43
PM	2	-
POLRI	3	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17	-
Pengusaha kecil menengah	6	-
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Clukun kampung terlatih	3	5
gasa pengobatan alternatif	2	-
Bisnis swasta	-	-
Pengusaha besar	-	-
arsitektur	-	-
Seniman/artis	-	-
Karyawan perusahaan swasta	27	-
Karyawan perusahaan pemerintahan	8	-
Wakelar/broker/mediator	-	-
Aspir	34	-





Tukang cukur	2	Orang	-	Orang
Tukang batu/kayu	131	Orang	-	Orang
Kusir dokar	-	Orang	-	Orang
Jumlah mata pencaharian pokok	3.735	Orang	991	Orang

F. AGAMA

F.1. Agama

Uraian	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Islam	4.082 Orang	4.053 Orang
Kristen	- Orang	- Orang
Katholik	- Orang	- Orang
Hindhu	- Orang	- Orang
Budha	- Orang	- Orang
Konghuchu	- Orang	- Orang
Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	- Orang	- Orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	- Orang	- Orang

F.2. Jumlah Penganut Agama

Uraian	Jumlah
Jumlah Penganut Agama	1 Agama

G. KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN

Uraian	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia	4.082 Orang	4.053 Orang
Warga Negara Asing	- Orang	- Orang
Dwi Kewarganegaraan	- Orang	- Orang
Jumlah	4.082 Orang	4.053 Orang

H. ETNIS

Etnis

Uraian	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
Aceh	- Orang	- Orang
Batak	- Orang	- Orang
Nias	- Orang	- Orang
Mentawai	- Orang	- Orang
Melayu	- Orang	- Orang
Minang	- Orang	- Orang
Kubu	- Orang	- Orang
Anak Dalam	- Orang	- Orang
Badui	- Orang	- Orang
Betawi	- Orang	- Orang
Sunda	- Orang	- Orang
Jawa	4.082 Orang	4.053 Orang
Madura	- Orang	- Orang
Bali	- Orang	- Orang
Banjar	- Orang	- Orang
Dayak	- Orang	- Orang
Bugis	- Orang	- Orang
Makasar	- Orang	- Orang
Mandar	- Orang	- Orang
Sasak	- Orang	- Orang





CURRICULUM VITAE

Nama : Mahmud Suyuti Dahlan

Nomor Induk Mahasiswa : 0710310123

Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 22 Mei 1988

Alamat Asal : RT/RW 01 Desa Karangturi, Kec. Munjungan,
Kab. Trenggalek

Email : masdazone@gmail.com

Pendidikan : a) SDN Karangturi I, Kabupaten Trenggalek
Tamat Tahun 2000
b) MTs Plus Raden Paku, Kabupaten Trenggalek
Tamat Tahun 2003
c) SMA DU 2 Unggulan BPPT, Kabupaten
Jombang Tamat Tahun 2006

Publikasi-Publikasi atau
Karya Ilmian : -

